



REPUBLIK INDONESIA



RANCANGAN RKP 2018

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI
Jakarta, 6 Juni 2017**

Kerangka Paparan

1

Pendahuluan

2

Pokok-Pokok Rancangan RKP 2018

3

Penutup

1

Pendahuluan

Tahapan Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan RKP 2018

(Sesuai PP 17/2017: Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional)

- Penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan;
- Tinjau ulang (*review*) angka dasar Kementerian/Lembaga;
- Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta ketersediaan anggaran;
- Penyiapan Rancangan Awal RKP;
- Penyusunan Pagu Indikatif;
- Koordinasi penyusunan Rancangan Awal RKP;
- Penetapan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga;
- Penyusunan Renja Kementerian/Lembaga;
- Pembahasan Rancangan RKP, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam pembicaraan pendahuluan;
- Penetapan RKP dan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga; dan
- Penyusunan dan penelaah RKA-K/L

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follows Program***.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial** dengan memperhatikan pada:
 - Pengendalian perencanaan
 - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
 - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
 - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas

Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)

Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan

Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

**RKP
2018**



Menajamkan Prioritas Nasional



10 PN dan 30 Program Prioritas



Memastikan pelaksanaan program



Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)



Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan



Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

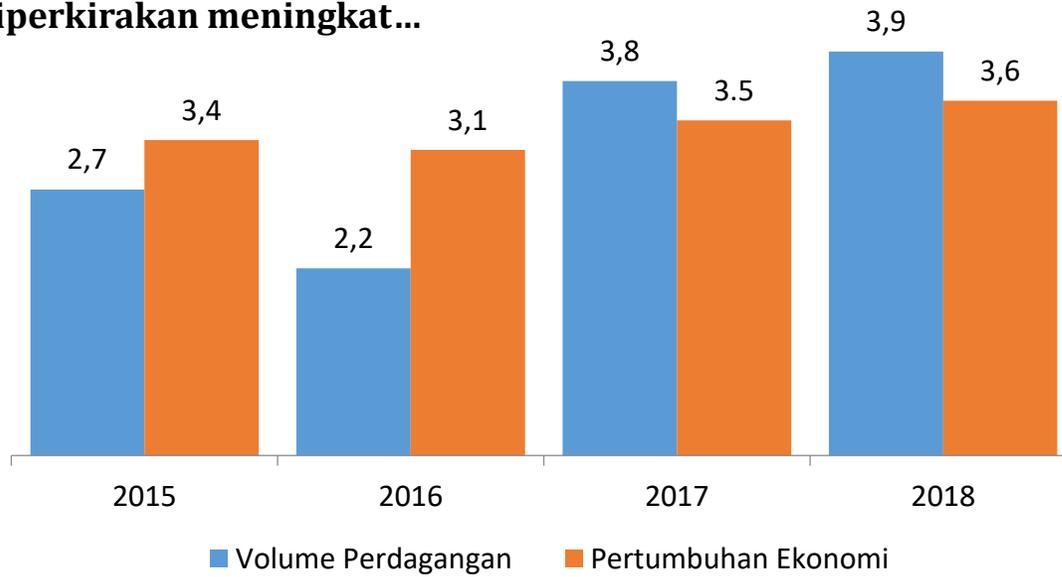
2

Pokok-Pokok Rancangan RKP 2018

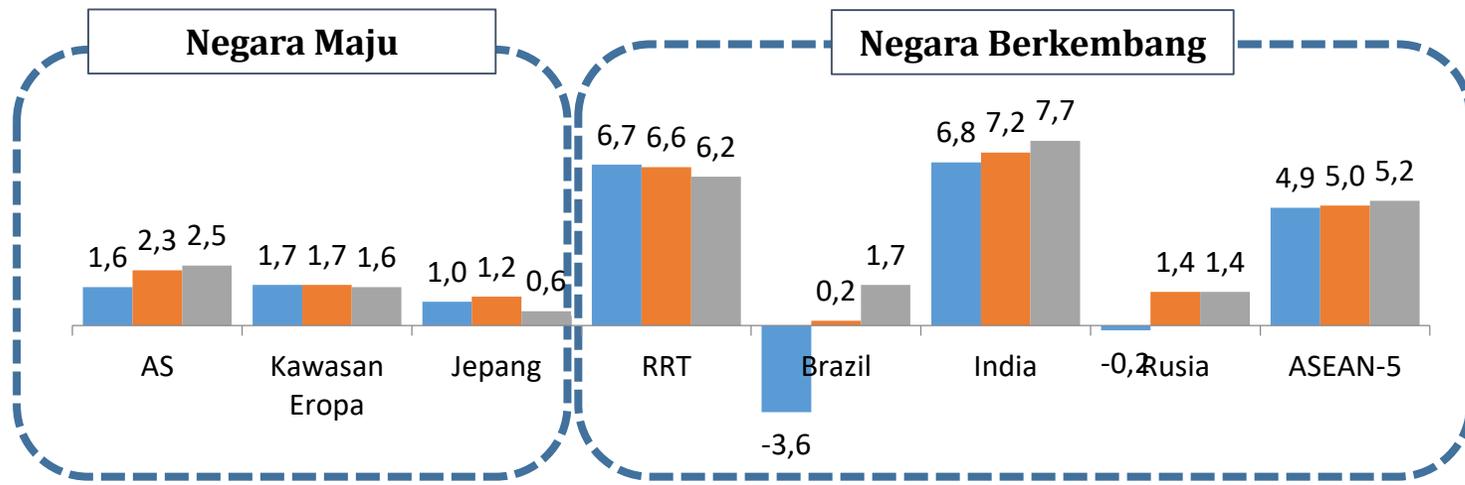
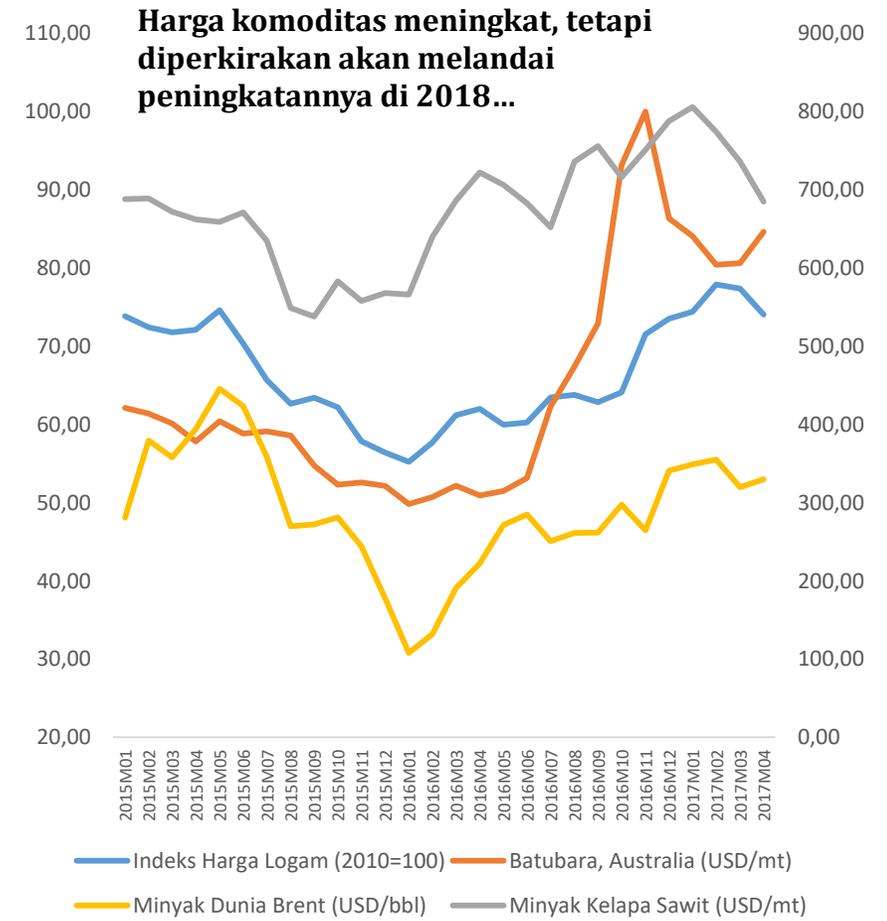
KERANGKA MAKRO (Mencapai target 5,4-6,1%)

Aktivitas Perekonomian Dunia Tahun 2018 Diperkirakan Membaik

Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat...



Harga Komoditas Global



Tetapi Masih Dihadapkan Pada Beberapa Risiko Global



Sumber: IMF, World Bank

Risiko baru muncul dari meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan kondisi politis di berbagai negara (IMF, 2017)



Indeks Ketidakpastian Kebijakan Global Meningkat (World Bank, 2017)



INDIKATOR EKONOMI MAKRO		2018
		Range
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-6,1
	Inflasi (%)	2,5-4,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	13.500-13.800
	ICP (USD/barrel)	45-60
	Lifting Minyak Mentah (rb barel/hr)	771-815
	Lifting Gas Bumi (rb barel/hr)	1.194-1.235

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali

Sasaran Ekonomi Makro 2018

Pertumbuhan ekonomi:
5,4 – 6,1%

Sisi Pengeluaran

	Konsumsi RT	: 5,1 – 5,3%
	Konsumsi LNPRT	: 5,8 – 6,1%
	Kons. Pemerintah	: 3,8 – 4,3%
	Investasi (PMTB)	: 6,3 – 8,0%
	Ekspor	: 5,1 – 6,1%
	Impor	: 4,5 – 5,5%

Sisi Produksi

	Industri Pengolahan	: 4,9 – 5,7%
	Konstruksi	: 6,7 – 7,6%
	Perdagangan	: 5,5 – 6,2%
	Infokom	: 10,5 – 11,9%
	Jasa Keuangan	: 10,1 – 11,0%
	Pertanian	: 3,6 – 4,0%
	Transportasi	: 8,3 – 9,2%
	Pertambangan	: 1,4 – 1,7%
	Listrik dan Gas	: 5,4 – 6,3%

Neraca Pembayaran

- Pertumbuhan Ekspor Non Migas : 5,0 – 7,5%
- Pertumbuhan Impor Non Migas : 5,0 – 7,3%
- Cadangan Devisa (USD Miliar) : 134 – 140,5
- dalam bulan impor : 8,6 – 8,7
- Defisit transaksi berjalan (% PDB) : 1,8 – 2,0%

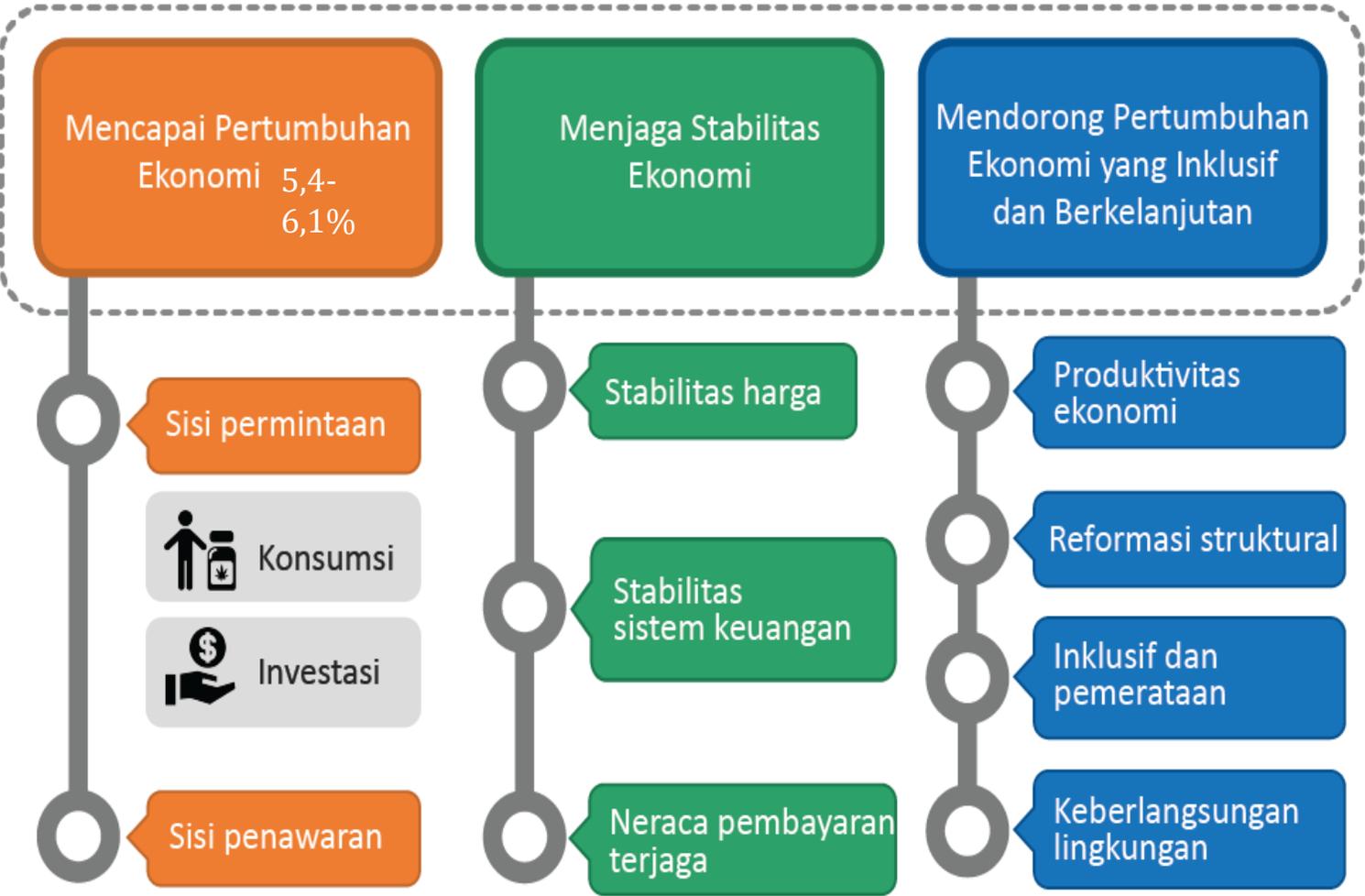
Keuangan Negara

- Penerimaan Perpajakan (% PDB) : 11,0 – 12,0
- Belanja Modal (% PDB) : 1,7 – 2,2
- Subsidi Energi ((% PDB) : 0,6 – 0,7
- Defisit APBN (% PDB) : 1,9 – 2,3
- Stok Utang Pemerintah (% PDB) : 27,0 – 29,0

Investasi

- Peringkat Indonesia pd EoDB : menuju 40
- Realisasi PMA-PMDN (Rp Triliun) : 733 – 863

Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2018



Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah:

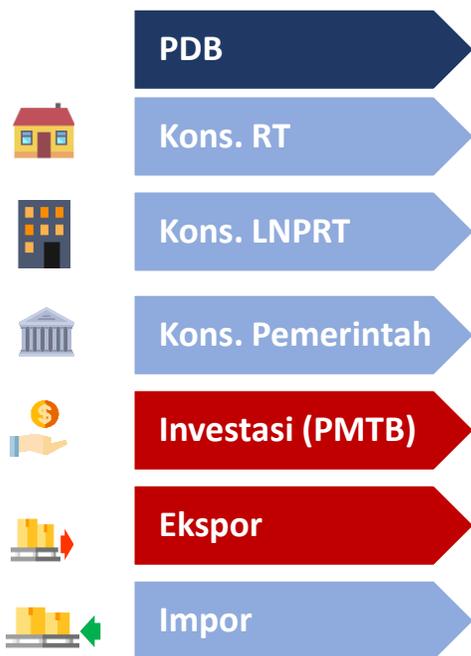
- Industri pengolahan, terutama nonmigas
- Informasi dan Komunikasi
- Perdagangan
- Pertanian
- Konstruksi
- Jasa Keuangan

Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:

- Industri pengolahan
- Pertanian
- Pariwisata

Kondisi dan Kebijakan Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018

2018



IMPOR akan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.



Investasi dan ekspor diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2018

INVESTASI:

- **Peranan investasi swasta diharapkan semakin meningkat (*private-led*)**, dengan dorongan upaya pemerintah: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi; (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; (5) perbaikan iklim tenaga kerja; (6) peningkatan pertumbuhan kredit dan restrukturisasi NPL.
- **Optimalisasi investasi pemerintah:** (1) Penajaman belanja pada kegiatan prioritas, serta (2) penyiapan program/kegiatan secara lebih baik

EKSPOR:

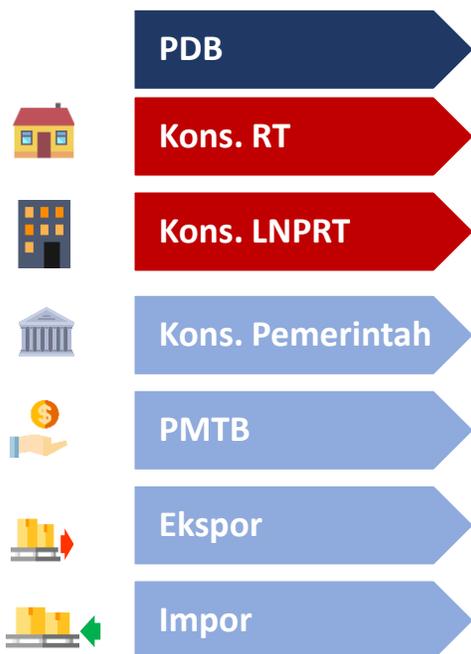
- Membaiknya ekonomi dan perdagangan global, serta kenaikan harga komoditas meski terbatas
- Peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata
- Peningkatan ekspor nonmigas karena upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada.

Kondisi dan Kebijakan Yang Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2018

2018



Konsumsi masyarakat tetap harus dijaga untuk tumbuh stabil dan tinggi tahun 2018, karena peranannya yang besar terhadap PDB



KONSUMSI MASYARAKAT meningkat, karena:

- Peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja baru karena aktivitas ekonomi yang lebih baik.
- Upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat: (1) meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin.

KONSUMSI LNPRT:

- Dua *event* besar: Asian Games dan WB/IMF Meeting
- Pilkada serentak di 171 daerah

Konsumsi pemerintah akan terbatas di tahun 2018

- Pembatasan belanja barang KL
- Penyesuaian kebijakan transfer ke daerah
- Pola penyerapan dan realisasi belanja yang lebih baik

Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

2018

PDB

5,4 – 6,1%

Pertanian

3,6 – 4,0%

Pertambangan

1,4 – 1,7%

Industri

4,9 – 5,7%

Listrik

5,4 – 6,3%



PERTANIAN:

- (i) Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan peningkatan irigasi
- (ii) Subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran
- (iii) Peningkatan perikanan budidaya dan rumput laut
- (iv) Penggantian alat untuk perikanan tangkap



PERTAMBANGAN:

- (i) Perbaikan harga bahan mineral



INDUSTRI:

- (i) Dampak realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan ketersediaan listrik
- (ii) Mulai efektifnya operasionalisasi beberapa kawasan industri (Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Ketapang, dan Morowali)
- (iii) Peningkatan investasi sektor pengolahan



LISTRIK:

- (i) Operasionalisasi pembangkit listrik dalam rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW
- (ii) Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri
- (iii) Peningkatan konsumsi gas bumi untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) dan penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif

Kondisi dan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi

2018

PDB

5,4 – 6,1%

Konstruksi

6,7 – 7,6%

Perdagangan

5,5 – 6,2%

Infokom

10,5 -11,9%

Jasa
Keuangan

10,1 – 11,0%



KONSTRUKSI:

- (i) Peningkatan pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan
- (ii) Implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas dan perumahan/pemukiman
- (iii) Stabilitas ekonomi makro dan makroprudensial yang kondusif terhadap sektor swasta.



PERDAGANGAN:

- (i) Peningkatan aktivitas industri pengolahan yang mendorong penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran
- (ii) Peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong aktivitas perdagangan
- (iii) Peningkatan ekspor dan impor yang mendorong aktivitas ekspedisi dan distribusi
- (iv) Kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru



INFORMASI DAN KOMUNIKASI:

- (i) Perluasan jaringan 4G dan 4,5G
- (ii) Operasionalisasi dan pembangunan fiber optik nasional (palapa ring)



JASA KEUANGAN:

- (i) Pengembangan keuangan inklusif (perluasan pemanfaatan inovasi teknologi)
- (ii) Peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota (*branchless banking*, perluasan penggunaan tabungan, serta pembiayaan mikro dan asuransi mikro)
- (iii) Edukasi keuangan dan perlindungan konsumen keuangan

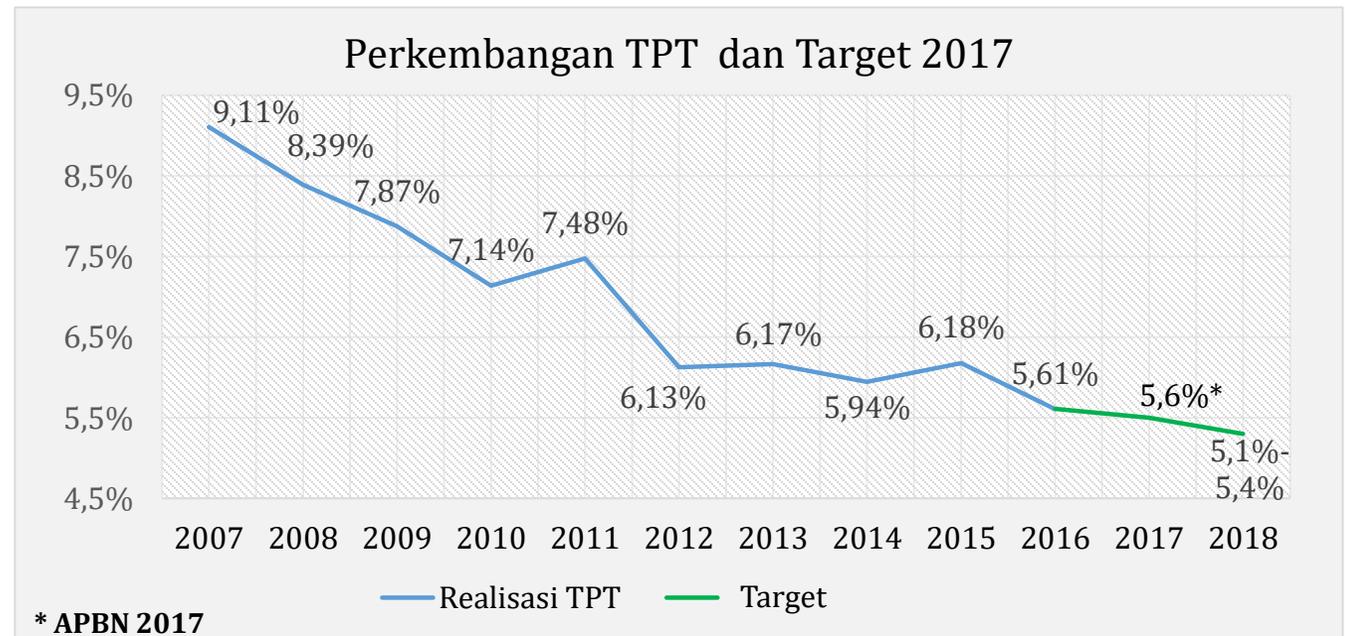
TARGET PEMBANGUNAN 2018 (Pengangguran, Kemiskinan, Gini Rasio)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Pengangguran di perkirakan menurun pada kisaran 5,1-5,4%

Penurunan TPT menggunakan asumsi

- Pertumbuhan ekonomi kisaran 5,4-6,1%
- Angkatan kerja baru < 2juta
- Kesempatan kerja baru tercipta 2,3-2,5 juta
- Elastisitas per 1 persen pertumbuhan ekonomi > 400 ribu orang



- Peningkatan investasi dan anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi seperti industri manufaktur, untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
- Industri padat karya akan menampung penganggur dan setengah penganggur sehingga memperkecil kesenjangan dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan
- Sektor jasa juga menjadi andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi.

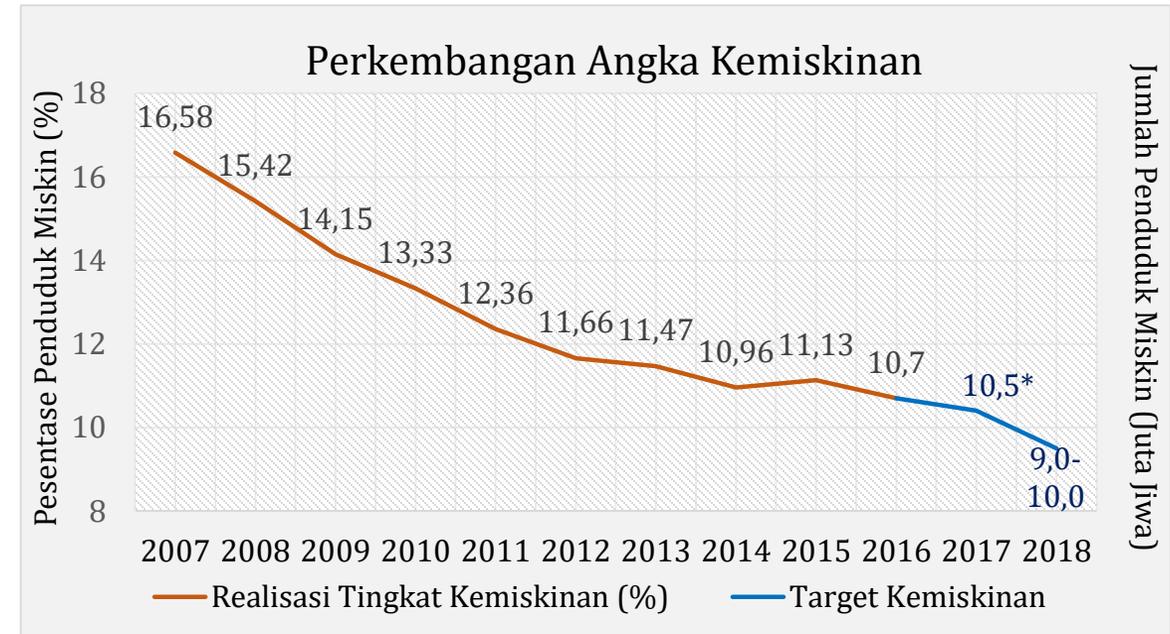
Target Pembangunan 2018

Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan diperkirakan menurun pada kisaran 9-10 %

Penurunan angka kemiskinan menggunakan asumsi

- Asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi
- Harga komoditas bahan makanan stabil
- Program-program afirmasi pengurangan kemiskinan tepat sasaran dan tepat waktu

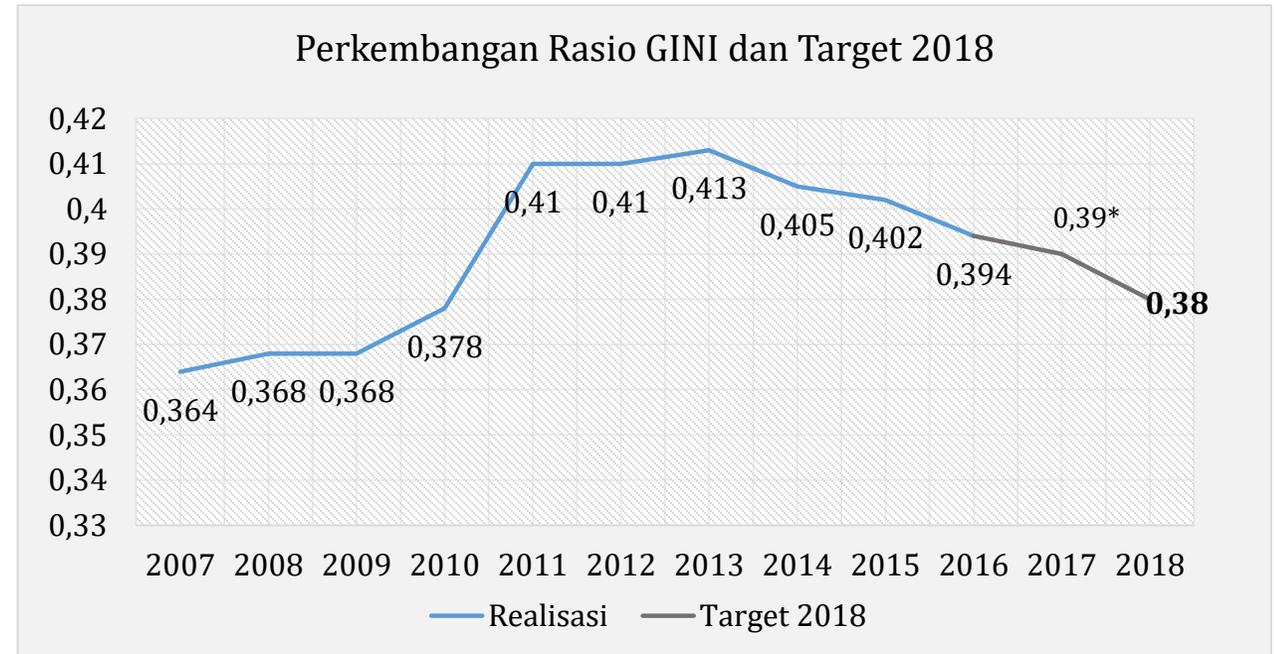
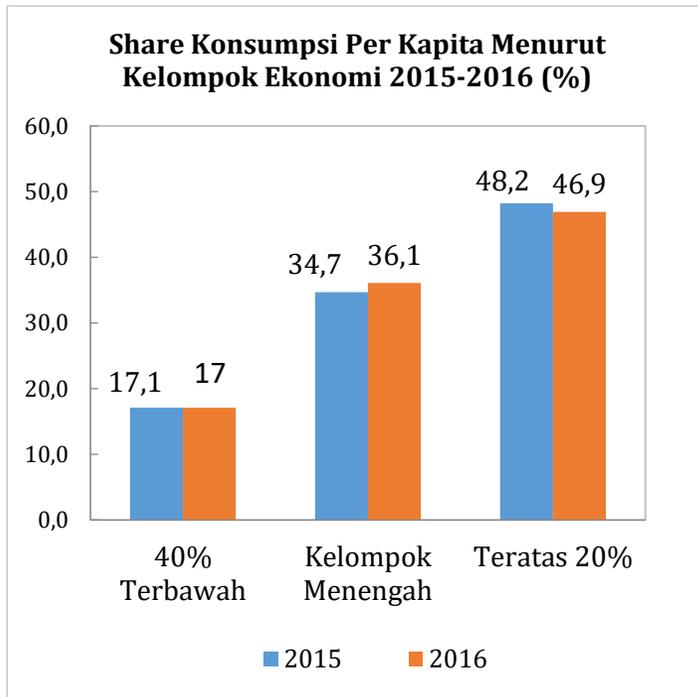


Penajaman Program tahun 2018

- Penggunaan basis data untuk semua program perlindungan sosial
- Perluasan konversi beras sejahtera menjadi layanan non-tunai di seluruh kota dan sebagian besar kabupaten
- Penyaluran subsidi energi dan LPG-3Kg non tunai
- Perluasan program keluarga harapan (PKH) dengan memenuhi persyaratan (CCT) dan memperbaiki sistim informasi/MIS
- Jangkauan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan identitas kependudukan

Gini Rasio

Gini rasio diperkirakan menurun menjadi 0,38



* APBN 2017

- Gini koefisien untuk bulan September tahun 2016, sebesar 0,394 turun 0,8 poin dari 0,402 di bulan September 2015.
- Penurunan Rasio Gini terjadi karena adanya pengurangan tingkat konsumsi per kapita pada desil paling atas. Sementara, kelompok menengah mulai mengalami kenaikan, meski kecil. Meskipun, kelompok 40 persen terbawah masih belum mengalami kenaikan.
- Penguatan kebijakan fiskal dalam redistribusi pendapatan yang lebih berkeadilan, dan pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 40 % ke bawah merupakan prioritas.

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Sasaran Pembangunan Nasional

Wilayah Sumatera	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 5%

Wilayah Kalimantan	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 3%
Tingkat Kemiskinan	Max 6%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 6%

Wilayah Sulawesi	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 7%
Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 4%



Wilayah Maluku	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 13%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 5%

Wilayah Jawa	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 6%

Wilayah Bali Nusa Tenggara	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 14%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 3%

Wilayah Papua	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 26%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 4%

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas

Wilayah Papua	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 26%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 4%

- Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertambangan dan Penggalian
 2. Konstruksi
 3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 4. Industri Pengolahan
 5. Perdagangan besar dan eceran

- Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Papua Barat
 2. Provinsi Papua

- Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :
1. Provinsi Papua Barat

Pariwisata Raja Ampat
Kab. Raja Ampat, Papua Barat

KEK Sorong
Kab. Sorong, Papua Barat

KI Bintuni
Kab. Bintuni, Papua Barat

PEMBANGUNAN JALAN
DAN PELABUHAN
MENDUKUNG KEK

PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA

PEMBANGUNAN JALAN
PARALEL PERBATASAN
DI PAPUA

PENYEDIAAN LAYANAN
'JEMBATAN UDARA"
DI PAPUA

-  Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
-  Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Pembangunan Papua juga dilakukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.

Rencana Pengembangan Wilayah Maluku Tahun 2018

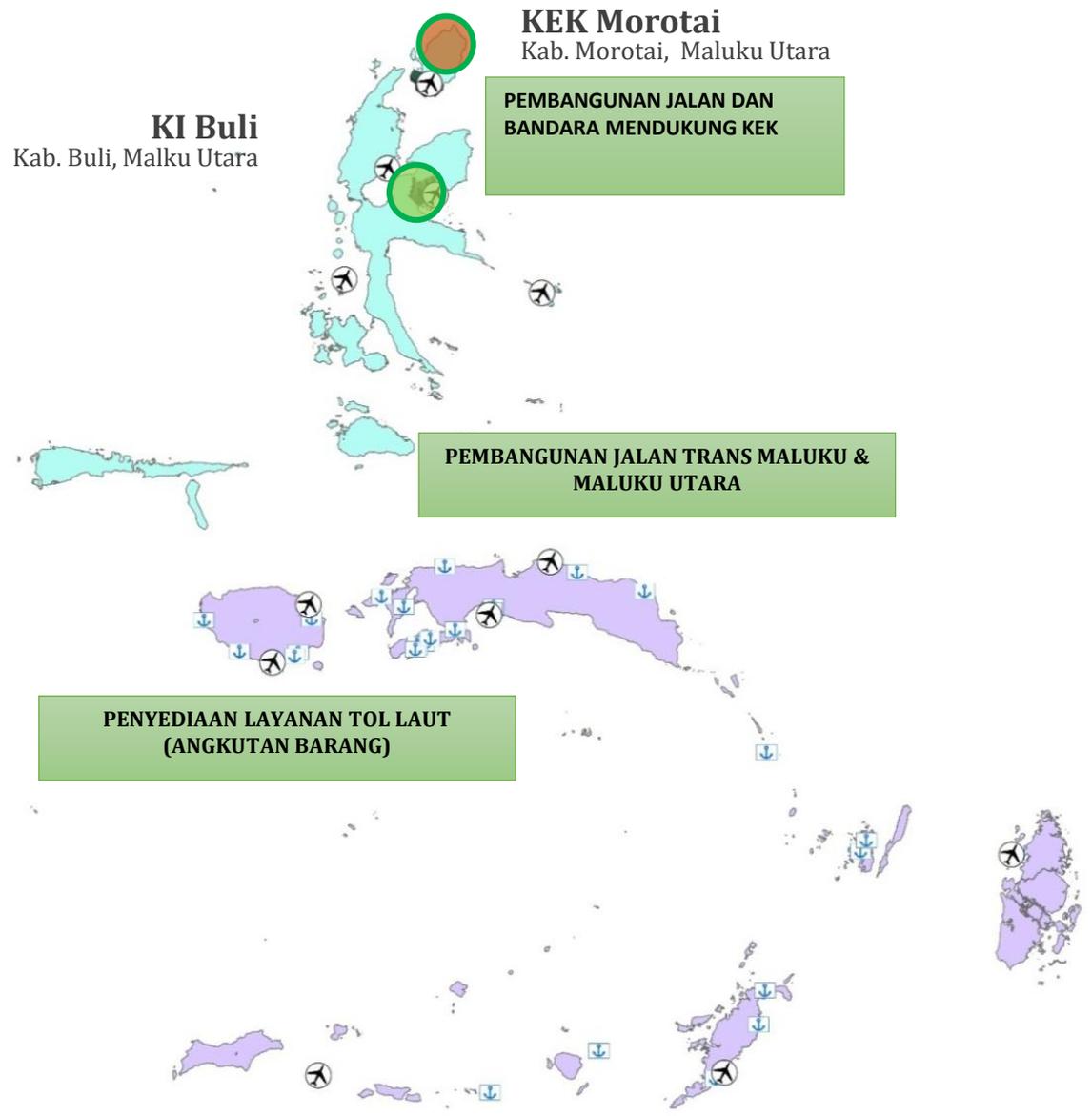
Wilayah Maluku	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 13%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 5%

- Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 2. Administrasi Pemerintahan
 3. Perdagangan besar dan eceran
 4. Konstruksi

- Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi Maluku

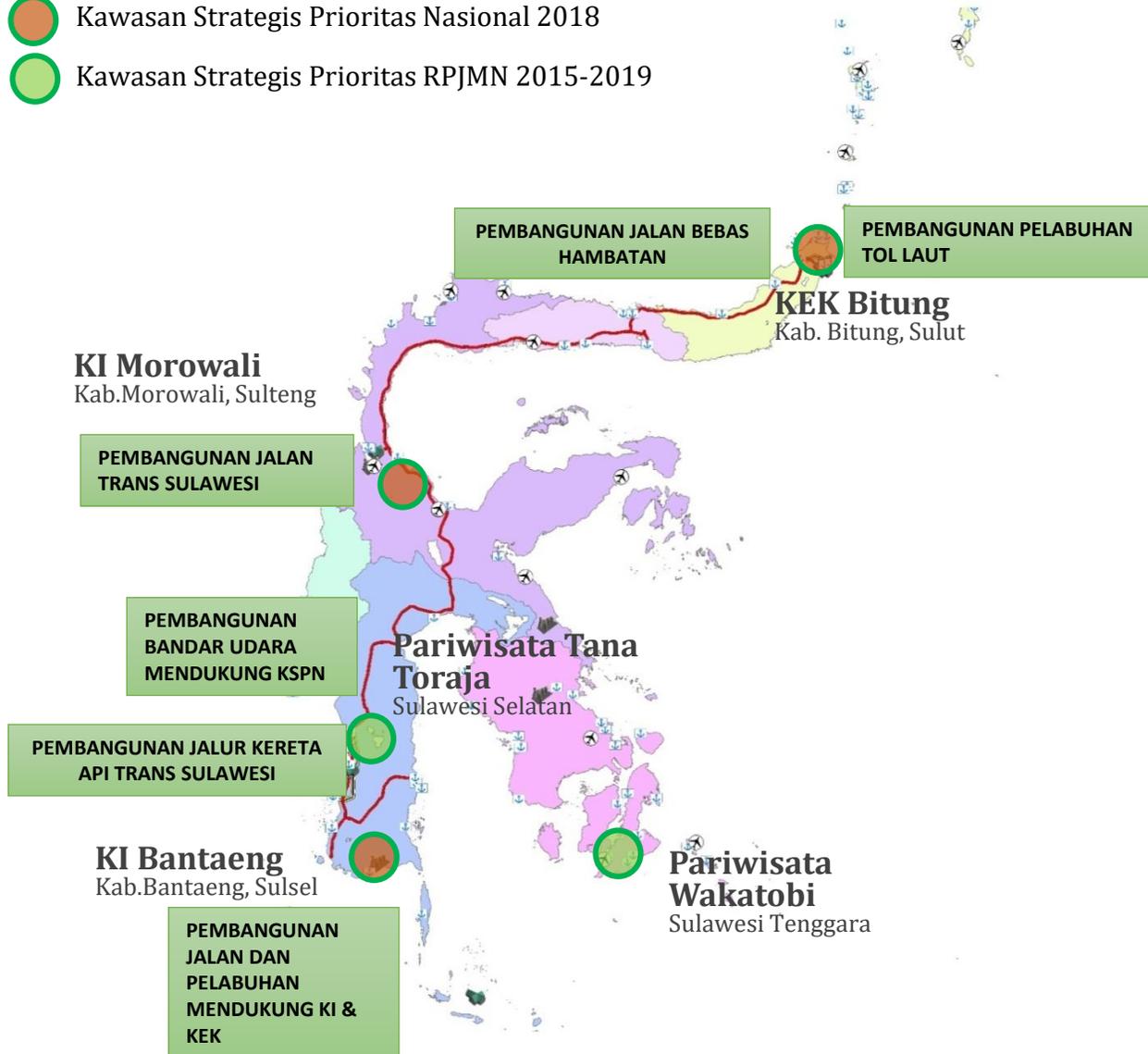
- Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :
1. Provinsi Maluku

-  Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
-  Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019



Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2018

-  Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
-  Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019



Wilayah Sulawesi

Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 7%
Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 4%

Sektor-sektor penggerak perekonomian

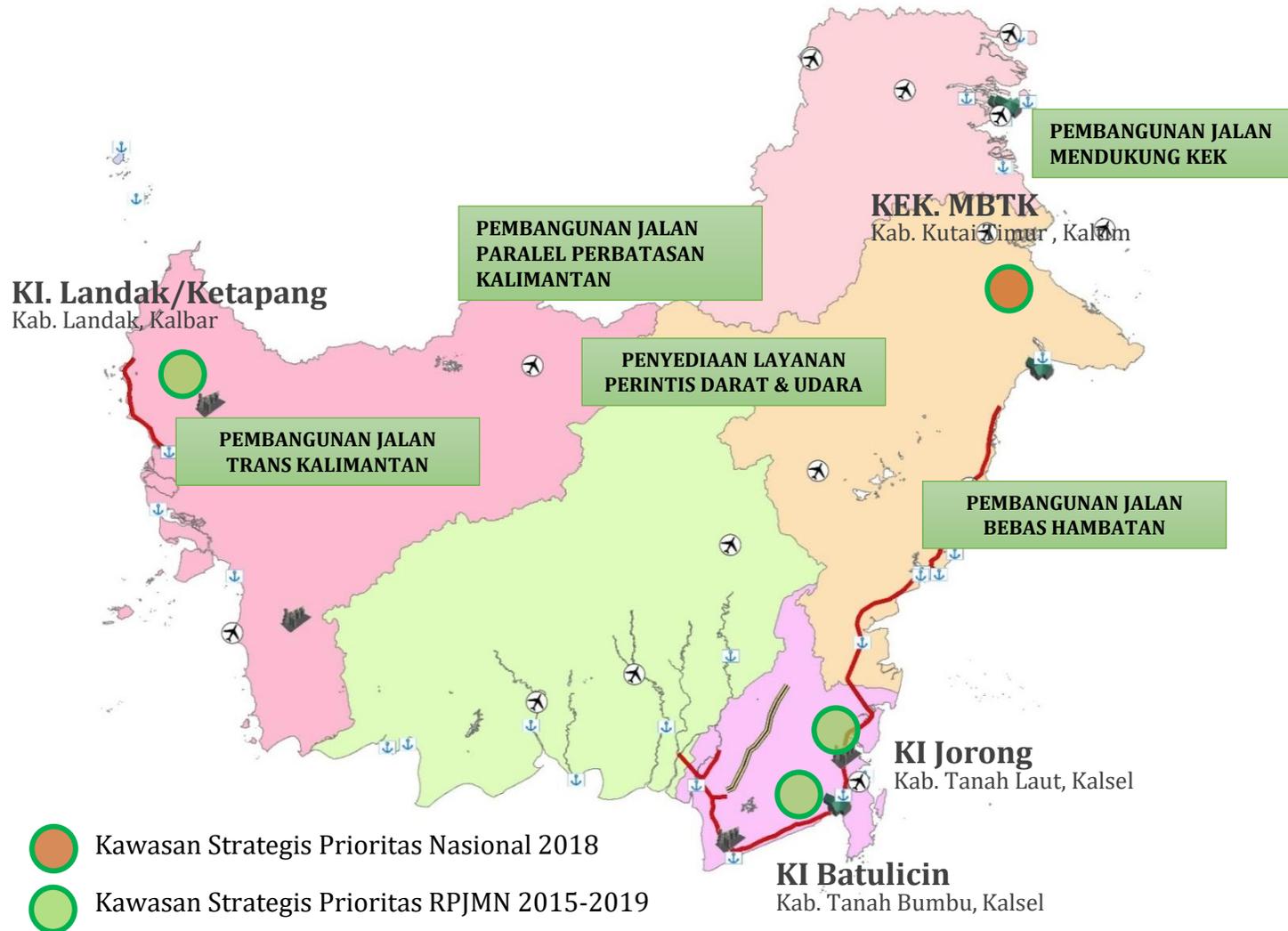
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Konstruksi
3. Perdagangan besar dan eceran
4. Industri Pengolahan
5. Pertambangan dan Penggalian

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :

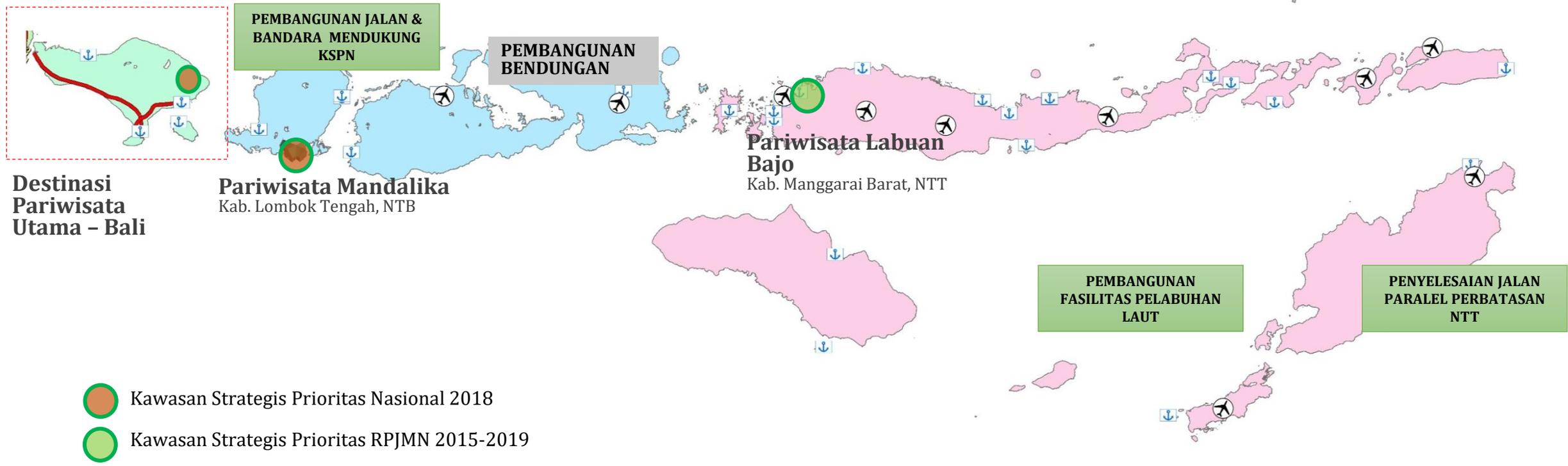
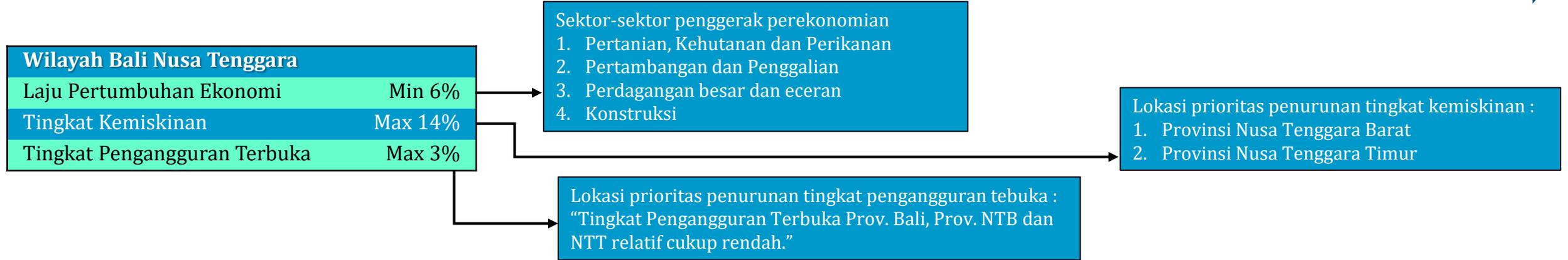
1. Provinsi Gorontalo
2. Provinsi Sulawesi Tengah
3. Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Provinsi Sulawesi Barat

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :

1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Sulawesi Selatan



Rencana Pengembangan Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2018



Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tahun 2018



Wilayah Jawa	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 6%

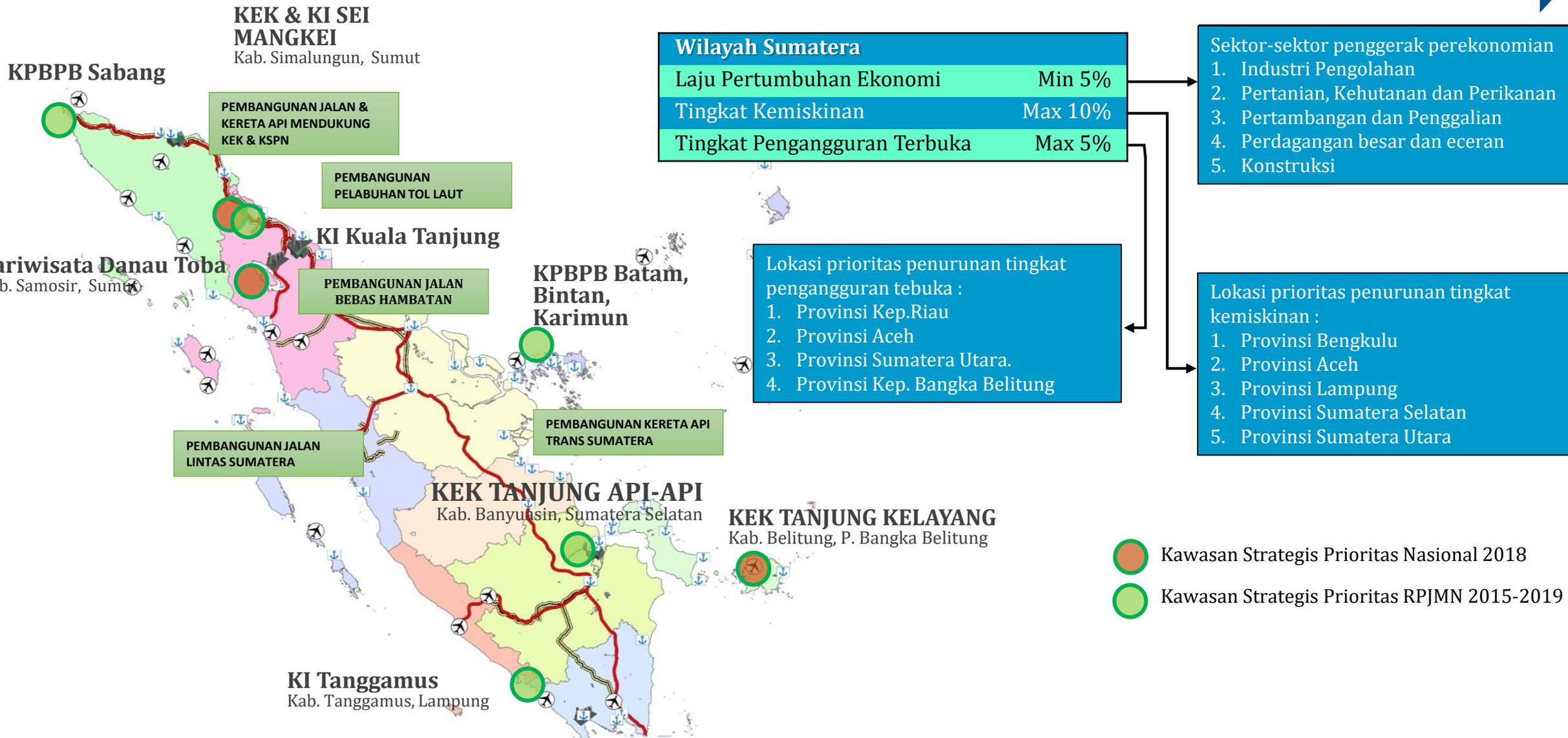
- Sektor-sektor penggerak perekonomian
1. Industri Pengolahan
 2. Perdagangan besar dan eceran
 3. Konstruksi
 4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

-  Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
-  Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

- Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :
1. Provinsi Jawa Barat
 2. Provinsi Banten

- Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :
1. Provinsi D.I Yogyakarta
 2. Provinsi Jawa Tengah
 3. Provinsi Jawa Timur
 4. Provinsi Jawa Barat

Rencana Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2018

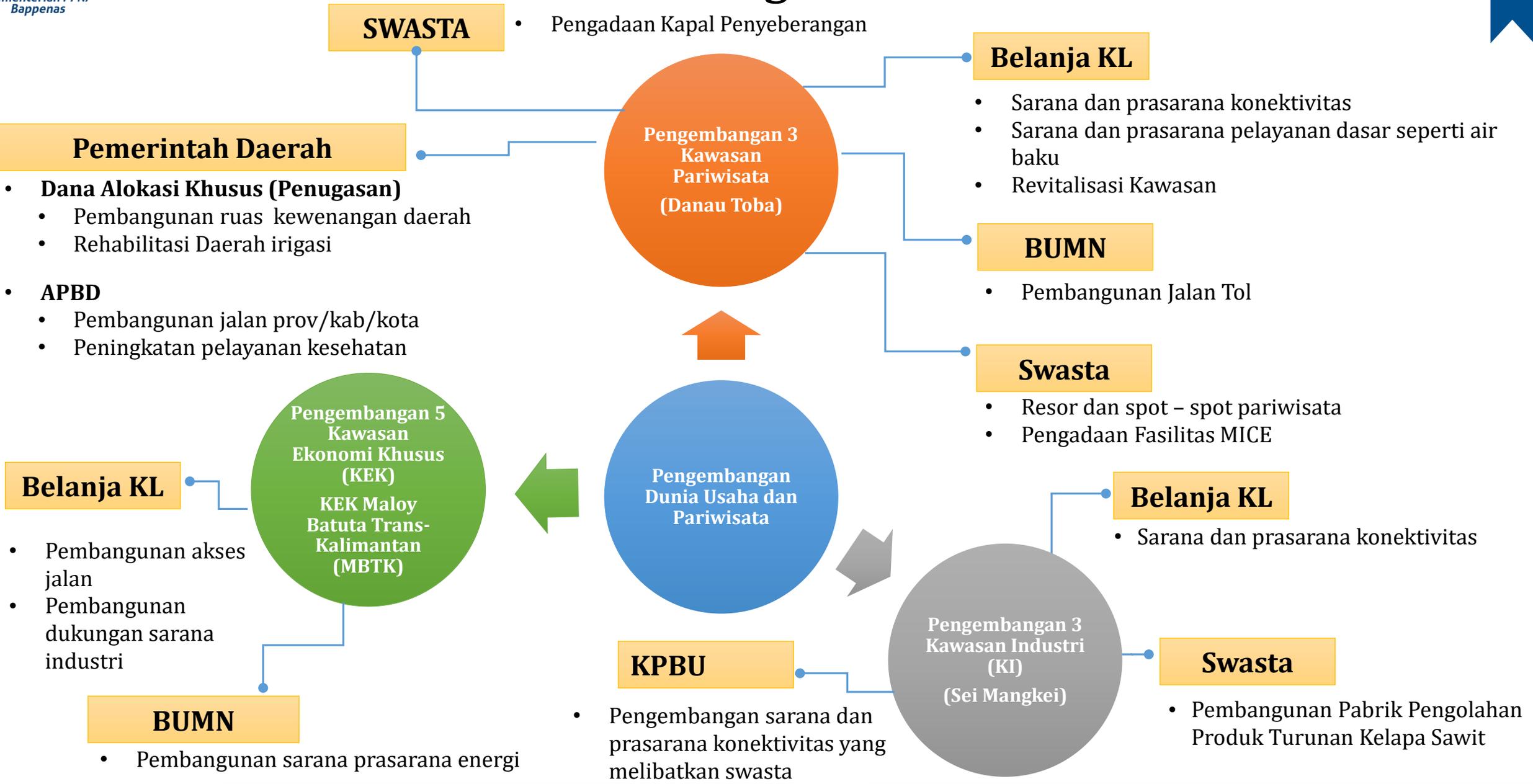


KERANGKA PENDANAAN

Untuk meningkatkan efektivitas dalam mendanai prioritas pembangunan dan mengimplementasikan **Money Follow Program**, pemerintah telah mengeluarkan PP NO. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang memuat antara lain :

1. Perkuatan kendali program. Perencanaan pendanaan dilakukan pada prioritas pembangunan hingga tingkat pelaksanaan (keluaran dan lokus yang jelas)
2. Pengintegrasian sumber – sumber pendanaan baik belanja pusat (K/L dan Non K/L), transfer ke daerah maupun non APBN
3. Memperkuat koordinasi antar instansi dan antar pusat daerah dengan memfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan agar :
 - Kesiapan pelaksanaan program dibahas sejak awal
 - Integrasi antar program dan antar pelaku pembangunan
4. Mengintegrasikan dokumen perencanaan, dokumen anggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu (KRISNA)

Contoh : Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan



Pendanaan Rancangan RKP

Pendanaan Rancangan RKP yang melalui Kementerian/Lembaga diarahkan sebagai berikut :

URAIAN	% Terhadap Pagu Indikatif
Belanja Operasional	33,3
Belanja Prioritas	57,2
<i>Prioritas Nasional (prioritas yang merupakan penekanan RKP)</i>	34,3
<i>Prioritas Bidang (prioritas untuk pencapaian target RPJMN 2015-2019)</i>	22,9
Lainnya	9,5
TOTAL	100



Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018

RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018

DAK REGULER		DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan		Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>Area/Spatial Based</i>).	Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
1. Pendidikan	10. Pariwisata	1. Kesehatan (Puskesmas)	1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB	11. Jalan	2. Perumahan dan Permukiman	2. Kesehatan
3. Air Minum		3. Transportasi	3. Air Minum
4. Sanitasi		4. Pendidikan	4. Sanitasi
5. Perumahan dan Permukiman		5. Air Minum	5. Jalan
6. Pasar		6. Sanitasi	6. Irigasi
7. IKM			7. Pasar
8. Pertanian			8. Energi Skala Kecil
9. Kelautan dan Perikanan			9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat **penambahan 4 bidang DAK Reguler baru** yaitu **Air Minum dan Sanitasi** untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta **Pasar dan Jalan** untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.

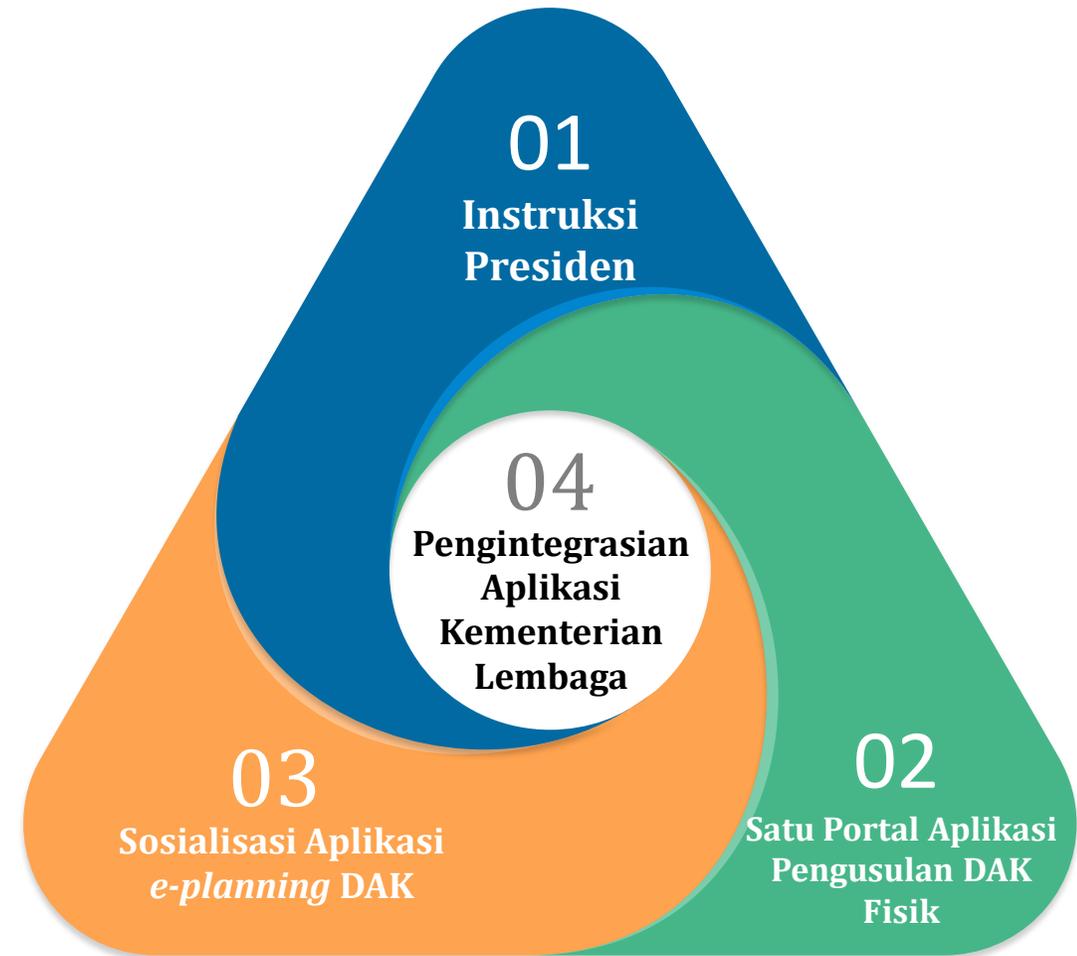
Terdapat **penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru** yaitu **Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi**, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.

Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat **penambahan 1 bidang DAK** dari **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Terdapat bidang – bidang yang **kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK**, namun berbeda dalam **fokus menu kegiatan dan lokasinya**.

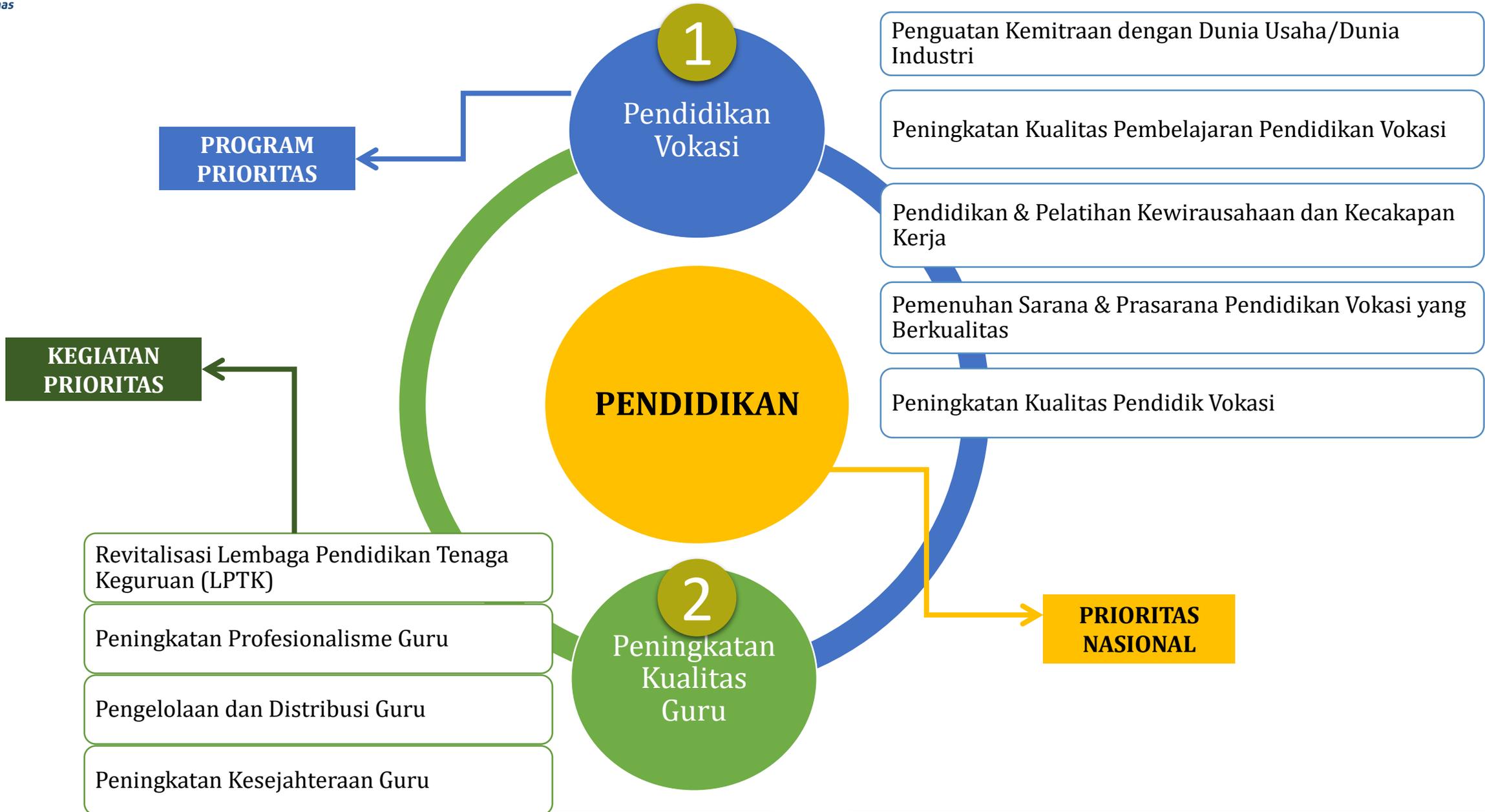
Langkah Penyempurnaan Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018 : Pengusulan DAK Fisik Tahun 2018 Melalui Aplikasi *E-planning*

- 01 Instruksi Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”;
- 02 Penyusunan aplikasi *e-planning* DAK ini menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah).
- 03 Dilakukan pengintegrasian *e-planning* DAK ke *e-planning* Bappenas.
- 04 Aplikasi *e-planning* DAK Fisik ini akan disinkronkan dengan sistem serupa di K/L Pengampu DAK.



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PN 1: Pendidikan



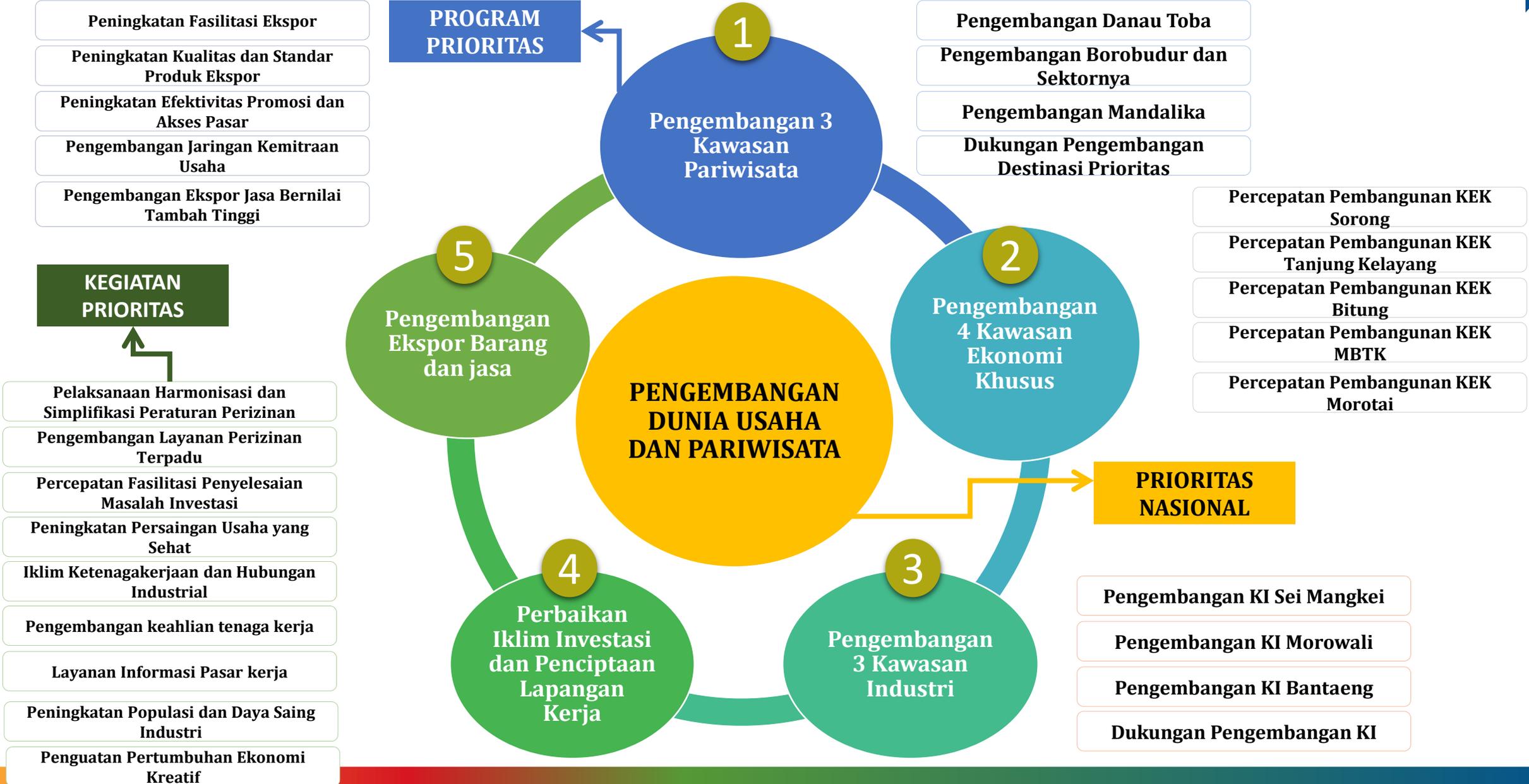
PN 2: Kesehatan



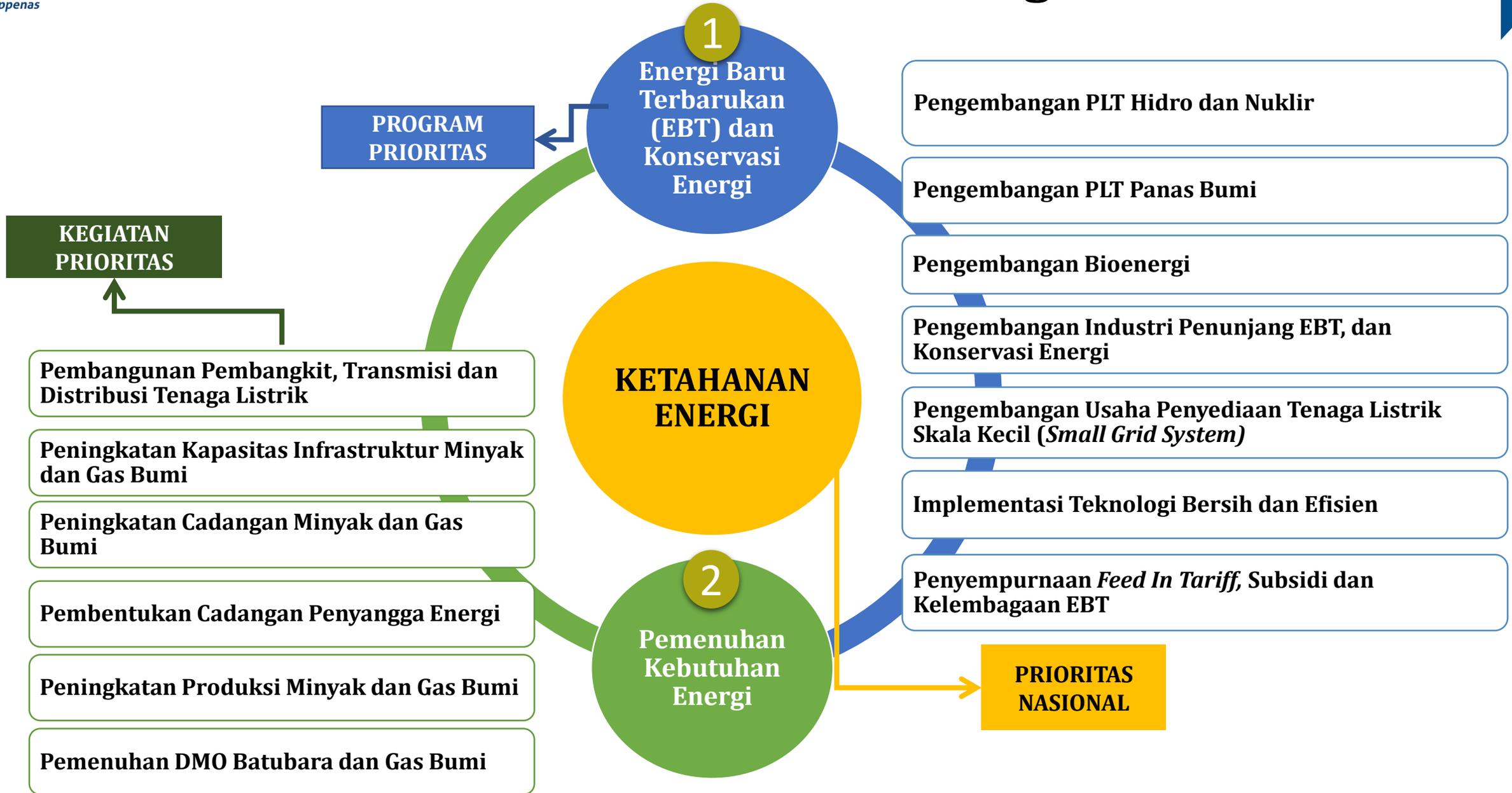
PN 3: Perumahan dan Permukiman



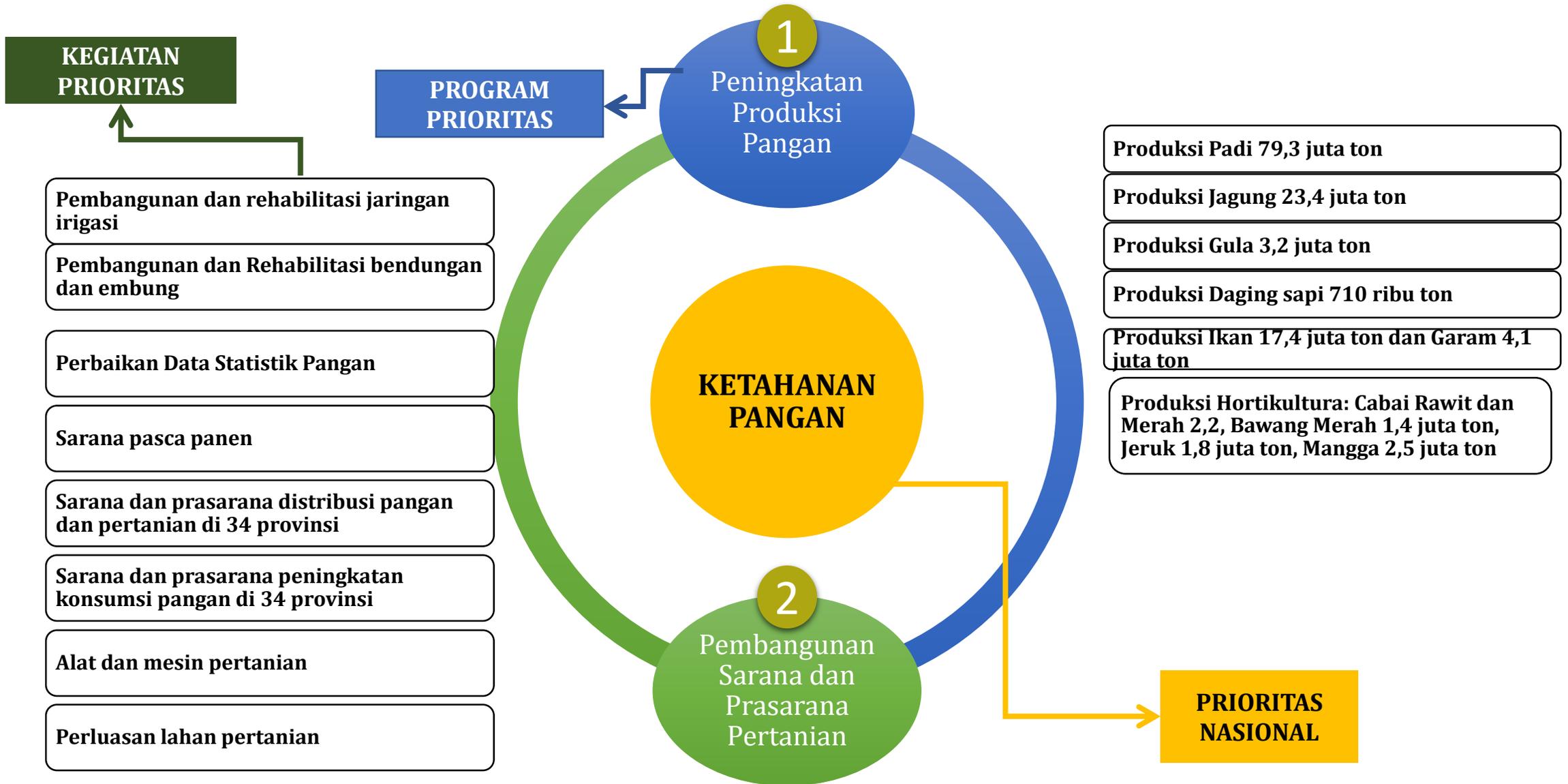
PN 4: Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata



PN 5: Ketahanan Energi



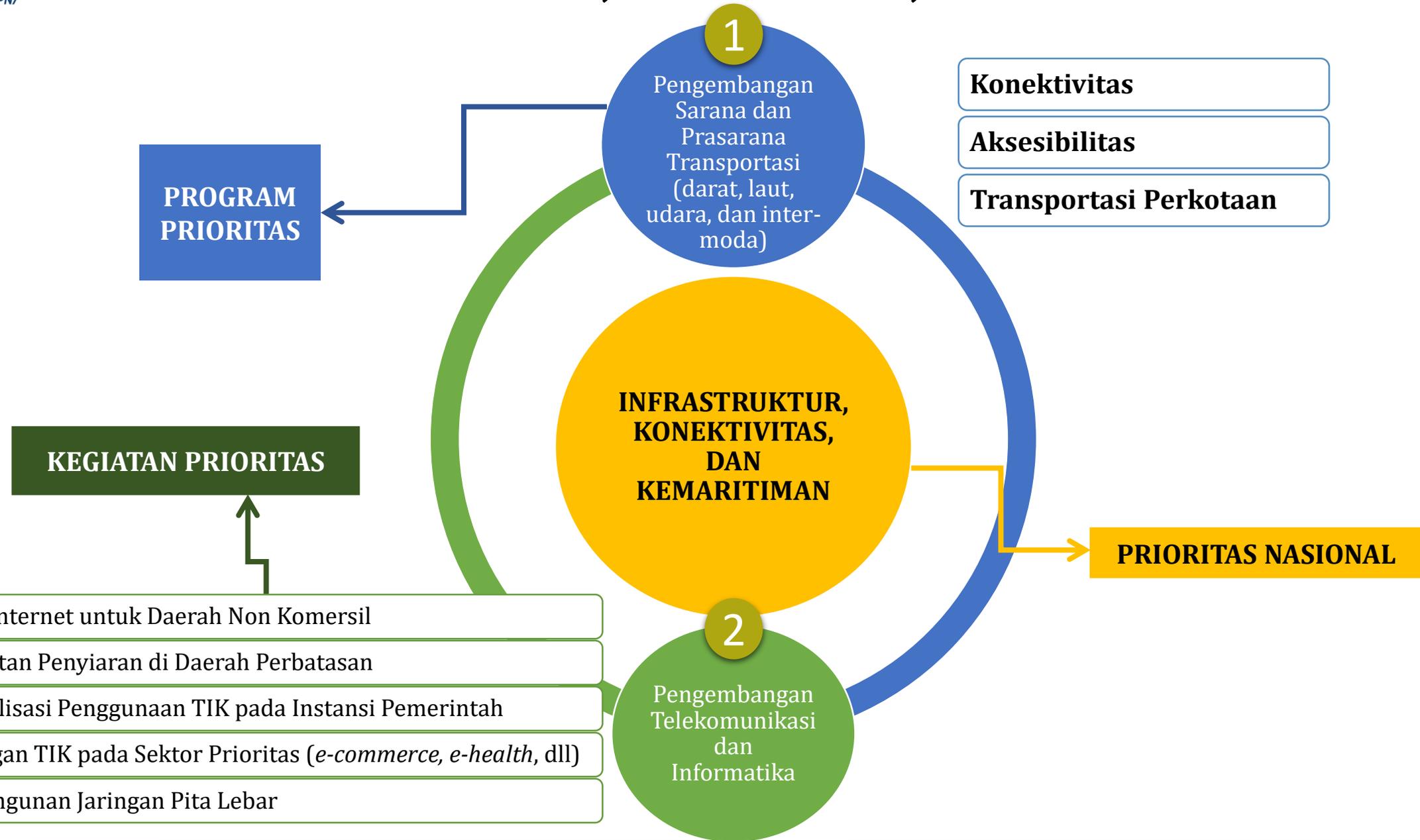
PN 6: Ketahanan Pangan



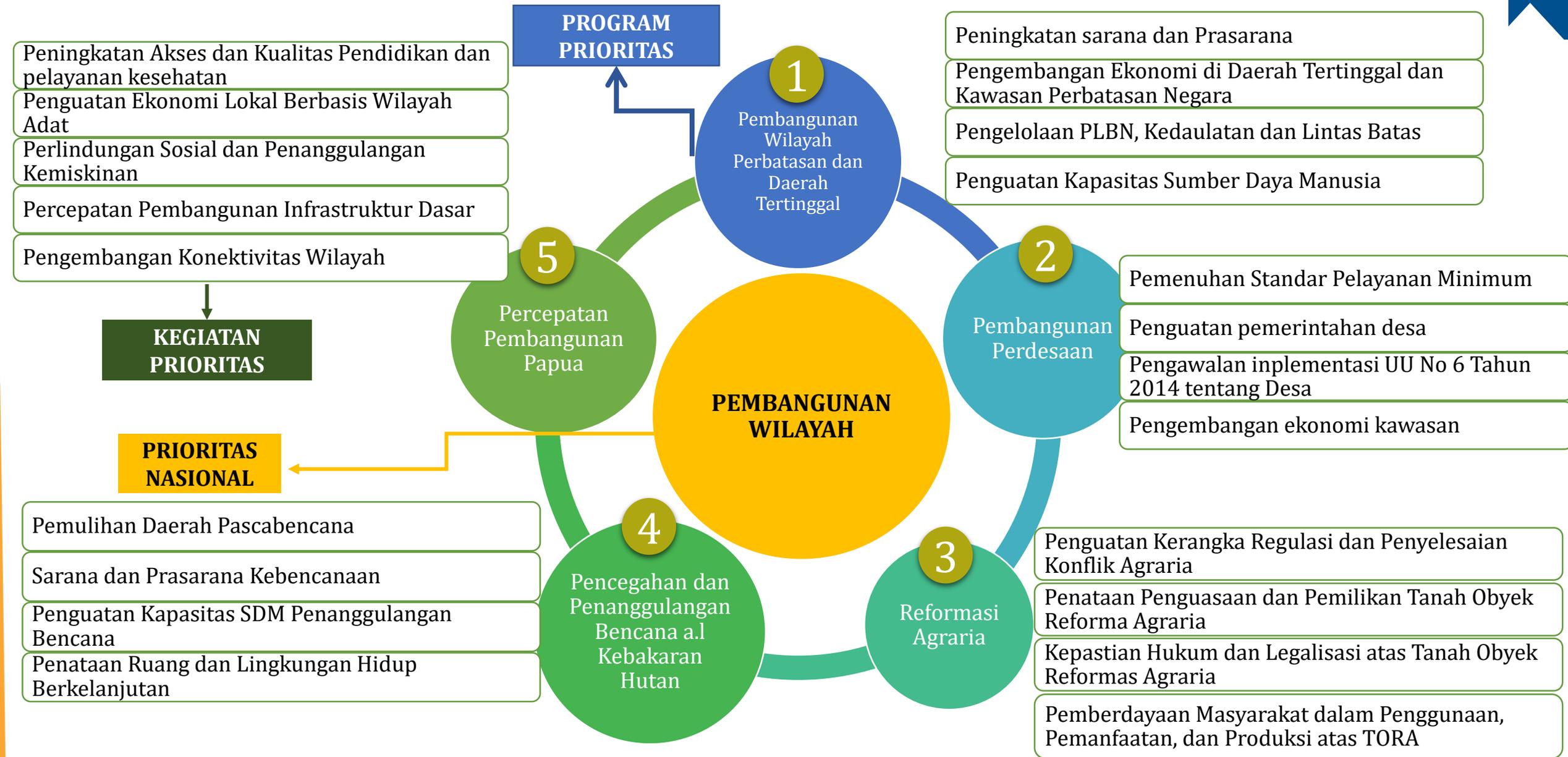
PN 7: Penanggulangan Kemiskinan



PN 8: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman



PN 9: Pembangunan Wilayah



PN 10: Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan





3 Penutup

Penutup

1. RKP 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17/ 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2. Dengan penajaman prioritas nasional, sasaran pembangunan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan pengurangan kesenjangan dapat dicapai lebih baik melalui peningkatan investasi dan infrastruktur.
3. Dalam upaya perkuatan pelaksanaan Kebijakan ***Money Follows Program*** dan pendekatan **Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial**, telah dilakukan :
 - a) Pembahasan bersama instansi terkait dan pemerintah daerah;
 - b) Pengintegrasian dengan sumber pendanaan lainnya (a.l APBN, DAK, BUMN, PINA);
 - c) Pengendalian dan pengawalan pendanaan pembangunan (APBN, BUMN, PINA).
4. Rancangan Awal RKP 2018 ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN No 4/ 2017 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 sebagai bahan pembahasan dengan DPR. Hasil pembahasan dengan DPR akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir RKP 2018, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

TERIMA KASIH

LAMPIRAN

Prioritas Nasional Pendidikan

HIGHLIGHT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITASI: PENINGKATAN KUALITAS GURU

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	LOKASI
1.	Revitalisasi LPTK	a. 75 LPTK yang memenuhi persyaratan	34 provinsi
2.	Peningkatan Profesionalisme Guru	a. 318.756 guru yang ditingkatkan kompetensinya b. 28.475 guru yang disertifikasi c. 6.822 guru yang ditingkatkan kualifikasi S1/DIV d. 6.372 guru yang berkinerja baik e. 7.558 guru yang mengikuti KKG/MGMP (kelompok kerja guru/musyawaharah guru mata pelajaran)	34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi
3.	Pengelolaan dan Distribusi Guru	a. 34 kab/kota yang menyusun perencanaan kebutuhan dan penataan guru mata pelajaran umum b. 500 sarjana mengajar di daerah 3T c. 400 Guru Garis Depan yang ditempatkan di daerah 3T	34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi
4.	Peningkatan Kesejahteraan Guru	a. 638.269 guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) b. 31.969 guru yang mendapatkan tunjangan khusus c. 410.596 guru yang mendapatkan tunjangan fungsional d. 14.360 guru yang mendapatkan insentif penghargaan dan perlindungan	34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi

HIGHLIGHT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITASI: PENDIDIKAN VOKASI

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	LOKASI
1.	Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri	<ul style="list-style-type: none"> a. 132 SMK yang bekerjasama dengan DU/DI b. 272 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (dual system) 4 tahun c. 272 SMK yang melaksanakan teaching factory d. 11 perguruan tinggi mengembangkan teaching industry e. 3 kab/kota melakukan inisiasi perumusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan industri/swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi f. 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan g. 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman 	<p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p> <p>7 provinsi</p> <p>3 provinsi</p> <p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p>
2.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. 4 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI b. 30.000 SMK diakreditasi c. 10.000 lembaga kursus dan pelatihan diakreditasi d. 1.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian 	<p>Pusat</p> <p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p>
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. 75.000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja b. 53.000 angkatan kerja muda mendapatkan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha c. 4.000 pemuda difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan 	<p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p> <p>34 provinsi</p>

HIGHLIGHT SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PRIORITASI: PENDIDIKAN VOKASI

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	LOKASI
4.	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa** b. 45 sekolah mendapatkan alat produksi utama** c. 4.600 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan** d. 1.500 ruang kelas baru dibangun** e. 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi** f. 2 kampus diklat pelayaran dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 34 provinsi 2 provinsi
5.	Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. 15.500 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif b. 1.421 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya 	<ul style="list-style-type: none"> 34 povinsi 34 provinsi

** Pendanaan diusulkan melalui DAK

Prioritas Nasional Kesehatan

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokus
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak		
a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.400 puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI	34 Provinsi
	Hasil penelitian dan pengembangan <i>Sample Registration Survey</i> (SRS) kematian dan penyebab kematian spesifik (1 riset)	30 Provinsi
	514 kabupaten/kota mendapat pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
	Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi 54,5 persen dari jumlah PUS yang menjadi peserta BPJS	34 Provinsi
a. Perbaiki kualitas gizi Ibu dan Anak	80 persen ibu hamil kurang energi kronis (KEK) yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
	85 persen balita kekurangan gizi yang mendapatkan PMT	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
	Penguatan intervensi paket gizi (PMT, vitamin A, TTD) pada ibu hamil dan balita di 514 kabupaten/kota	34 Provinsi dan 514 Kab/Kota
	Pengawasan 2.400 produk pangan terfortifikasi	33 provinsi
	Pelatihan pengasuhan anak di 14 provinsi	14 Provinsi
a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak	2.100 puskesmas yang siap diakreditasi	34 Provinsi
	10 RS pengampuyang memenuhi jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>	34 Provinsi
	147 RS yang siap diakreditasi	34 Provinsi
	126 tim (810 orang) penugasan tenaga kesehatan secara <i>team based</i> (Nusantara Sehat)	28 Provinsi dan 91 Kab/Kota
	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di 34 Provinsi	34 Provinsi
	Pendirian 1 RS UPT di Kawasan Indonesia Timur	Maluku
	Pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di 5.600 puskesmas	34 Provinsi
	15 RS integrasi rekam medis	34 Provinsi
	Penyediaan 850 unit alat laboratorium pengawasan obat dan makanan	33 provinsi
	Pengawasan 14.000 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	33 provinsi

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokus
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	5.369.038 unit sarana dan prasaranapenanggulangan TB	34 Provinsi
	7.500.000 unitsarana prasarana pengendalian HIV-AIDS	34 Provinsi
	240 orang yang difasilitasi PUG/PPRG dalam pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDS	9 Provinsi
	20 kab/kota dengan eliminasi malaria	20 kab/kota
	70 kab/kota dengan intensifikasi penemuan kasus kusta	70 kab/kota
	110.000 sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan	176 kab/kota
	14 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian schistosomiasis	2 Kabupaten
	300 ha restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	Kabupaten Poso
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	1.557 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian PTM	34 Provinsi
	78 paket layanan pengendalian konsumsi rokok	34 Provinsi
	Deteksi dini faktor risiko PTM di 500 kab/kota	500 kab/kota
a. Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan	Penyediaan vaksin di 34 provinsi	34 Provinsi
	Penyediaan layanan imunisasi dasar di 34 provinsi	34 Provinsi

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PENGUATAN PREVENTIF PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”
PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN**

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokus
Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”		
a. Peningkatan Lingkungan Sehat	5.000 desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas), 41.207 desa
	45 persen penyehatan air melalui pengawasan sarana air minum	34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas)
	Pengawasan pasar sehat di 500 pasar	34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas)
	Penghapusan penggunaan merkuri di 4 lokasi	Kota Palu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pulau Buru
a. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat	2.926 puskesmas yang melakukan penyehatan pangan melalui pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat	34 Provinsi, 514 kab/kota
	100 desa pangan aman	31 Provinsi
	5.000 sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	10 propinsi
	56 persen penyehatan udara, tanah, dan lingkungan fisik lainnya melalui pengawasan di Tempat-tempat Umum (TTU)	34 Provinsi, 514 kab/kota, 9.470 puskesmas (2.926 puskesmas prioritas)
	Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)dengan 32 mitra	34 Provinsi
a. Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat	200 kabupaten/kota yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Pusat, 34 Provinsi dan 100 kab/kota
	126 komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman	Pusat
	Kampanye hidup sehat melalui berbagai media di 100 kab/kota	Pusat, 34 Provinsi dan 100 kab/kota
	Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GEMA CERMAT) di 24 provinsi	24 provinsi
	Kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	Pusat

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR	Meningkatnya iklim kondusif dari seluruh rangkaian proses penyediaan rumah
2	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR	Meningkatnya penyediaan hunian dan peningkatan kualitas hunian bagi MBR
3	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	Meningkatnya akses rumah tangga MBR ke fasilitas pembiayaan perumahan
4	Pengentasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya luasan permukiman kumuh

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1	Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi	Meningkatnya akses air minum aman dalam rangka mencapai akses universal 2019
		Meningkatnya akses layanan sanitasi yang aman dalam rangka mencapai akses universal 2019
2	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	Terjaminnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik seluruh Indonesia
		Meningkatnya kualitas air baku untuk kebutuhan domestik

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Percepatan Pembangunan KEK Sorong	<p>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan yang clean and clear • Tersediaanya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR • Tersediannya model dinamika spasial • Tersediannya data batimetri dan garis pantai <p>b. Tersedianya pengelola KEK Sorong yang kompeten</p> <p>c. Terbangunnya konektivitas kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya infrastruktur jembatan akses pelabuhan • Terbangunnya pelabuhan <p>d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri</p> <p>e. Meningkatnya investasi KEK Sorong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/ dunia usaha dalam kawasan 	Provinsi Papua Barat (2 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Tanjung Kelayang <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan yang <i>clean and clear</i> • Tersediaanya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai 	Provinsi Bangka Belitung (1 Kabupaten)
		b. Tersedianya pengelola KEK Tanjung Kelayang yang kompeten	
		c. Terbangunnya konektivitas kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya dermaga penyeberangan 	
		d. Tersedianya tenaga terampil bidang pariwisata	
		e. Meningkatnya investasi KEK Tanjung Kelayang <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/ dunia usaha dalam kawasan 	
3.	Percepatan Pembangunan KEK Bitung	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Bitung <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai 	Provinsi Sulawesi Utara (1 Kabupaten)
		b. Tersedianya pengelola KEK Bitung yang kompeten	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		c. Terbangunnya infrastruktur di luar kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya PTLP • Terbangunnya PLTG/GU/MG d. Terbangunnya konektivitas kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya jalan tol e. Tersedianya tenaga terampil bidang industri dan perikanan f. Meningkatkan investasi KEK Bitung <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (tenant) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 	
4.	Percepatan Pembangunan KEK Maloy-Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK MBTK <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersediannya model dinamika spasial • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai b. Tersedianya pengelola KEK MBTK yang kompeten	Provinsi Kalimantan Timur (3 Kab/Kota)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<p>c. Terbangunnya konektivitas kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya jalan akses pelabuhan • Pengembangan pelabuhan • Terbangunnya jalan tol • Terbangunnya bandar udara <p>d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri</p> <p>e. Meningkatnya investasi KEK MBTK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 	
5.	Percepatan Pembangunan KEK Morotai	<p>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Morotai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersedianya Data Batimetri dan Garis Pantai <p>b. Tersedianya pengelola KEK Morotai yang kompeten</p> <p>c. Terbangunnya konektivitas kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya jalan lingkar luar • Terbangunnya bandar udara <p>d. Tersedianya tenaga terampil bidang Pariwisata</p> <p>e. Meningkatnya investasi KEK Morotai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 	Provinsi Maluku Utara (1 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Pengembangan Danau Toba	<p>a. Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu KSPN Danau Toba (MYC) • Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu KSPN Danau Toba (MYC) • Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi <p>b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan sadar wisata untuk 2.700 orang di destinasi pariwisata prioritas Danau Toba <p>c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 9 unit sarpras ekowisata pada kawasan konservasi di Danau Toba 	Provinsi Sumatera Utara (8 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<p>d. Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara • 3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik <p>e. Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 kegiatan promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Sumatera Utara • Publikasi destinasi pariwisata prioritas Danau Toba melalui 10 unit media ruang di Eropa 	
2.	Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya	<p>a. Terbangunnya aksesibilitas (darat dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur dan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktivasi & Pembangunan KA Magelang – Yogyakarta (RM) & Jalur Ganda Kroya–Kutoarjo <p>b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan Sadar Wisata untuk 420 orang di destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. 	Provinsi DI Yogyakarta (4 Kabupaten dan 1 Kota); Provinsi Jawa Tengah (16 Kabupaten dan 3 Kota)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<p>c. Tersedianya amenities pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 6 unit sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya <p>d. Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara • 2 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Timur Tengah <p>e. Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 kegiatan promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Jawa Tengah • Publikasi destinasi pariwisata prioritas Borobudur melalui 500 spot media elektronik di Asia Pasifik 	

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Pengembangan Mandalika dan Sekitarnya	<p>a. Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonstruksi/psdeningkatan struktur jalan BIL – Kuta • Pengembangan bandara internasional Lombok <p>b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerakan sadar wisata untuk 420 orang di destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. <p>c. Tersedianya amenities pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika dan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan 11 unit sarpras pariwisata pada kawasan konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya <p>d. Efektivitas pemasaran ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Pasifik • 3 kegiatan misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. (paket perjalanan dan atraksi) di Asia Tenggara 	Provinsi Nusa Tenggara Barat (4 Kabupaten dan 1 Kota)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		e. Meningkatnya branding dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan <ul style="list-style-type: none"> • 3 kegiatan promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala Nasional/Internasional di Nusa Tenggara Barat • Publikasi destinasi pariwisata prioritas Mandalika dskt. melalui 10 media cetak di Asia Pasifik 	
4.	Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas	a. Tersusunnya <i>Integrated Masterplan</i> (IMP) 3 Destinasi Prioritas (Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, dan Wakatobi) b. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi melalui 25 media online untuk 7 destinasi prioritas lainnya dan 10 destinasi <i>branding</i> 	Provinsi Jawa Timur (4 Kabupaten); Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 Kabupaten); Provinsi Sulawesi Tenggara (2 Kabupaten); Provinsi Maluku Utara (1 Kabupaten); Provinsi Banten (4 Kabupaten dan 1 Kota); Provinsi Bangka Belitung (1 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Pengembangan KI Sei Mangkei	<p>a. Tersedianya lahan dan tercapainya kesesuaian tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> dan sudah mendapatkan izin lokasi serta izin usaha kawasan industri • Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, dan Raperda RDTR) <p>b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Sei Mangkei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Fly Over Sei Mangke dan Simpang Kuala Tanjung • Pembangunan jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung • Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Belawan • Beroperasinya Pusat Inovasi pendukung kawasan industri • Perencanaan Pembangunan Sentra IKM pendukung kawasan industri <p>c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Sei Mangke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 	Provinsi Sumatera Utara (1 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	2. Pengembangan KI Morowali	<p>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> dan sudah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha kawasan industri • Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, data batimetri dan garis pantai, dan Raperda RDTR) <p>b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Morowali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beroperasinya politeknik dan pusat inovasi logam di dalam kawasan industri • Tersedianya rumah susun sewa yang layak dan terjangkau untuk tenaga kerja di Morowali • Pelebaran Jalan Pelabuhan Bungku - Kawasan Industri • Pelebaran Jalan Tomata-Beteleme-Kolonodale • Pembangunan Bandara Morowali • Pembangunan Jalan Akses Bandara Morowali • Pembangunan Jalan Dalam Kota Bungku; Dalam desa Onepute Jaya; Dalam Kota Bahodopi; Dalam Desa Bahomakmur;Keurea – Bahomakmur oleh Pemerintah Daerah 	Provinsi Sulawesi Tengah (1 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<p>c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Morowali</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 	
3.	Pengembangan KI Bantaeng	<p>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> dan sudah mendapatkan izin lokasi dan izin usaha kawasan industri Tersusunnya Perda RDTR di sekitar KI (materi teknis, lokasi bimbingan teknis penyusunan RDTR, peraturan substansi, peta dasar skala 1:5000, data batimetri dan garis pantai, dan Raperda RDTR) <p>b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Bantaeng</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya akademi komunitas logam di Kawasan Industri Bantaeng lanjutan Preservasi Jalan Bantaeng-Bulukumba Tersedianya pengelola kawasan industri yang kompeten Penerapan INSW dalam Pelaksanaan Ekspor Limbah B3 	Provinsi Sulawesi Selatan (1 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Bantaeng <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan 	
4.	Dukungan Pengembangan KI Lainnya	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang b. Meningkatnya kesiapan operasional 11 Kawasan Industri Prioritas lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan rumah susun untuk mendukung politeknik KI Ketapang, KI Batulicin c. Meningkatnya investasi di 11 Kawasan Industri Prioritas lain	Provinsi Sulawesi Utara (1 Kota); Provinsi Kalimantan Barat (2 Kabupaten); Provinsi Kalimantan Selatan (2 Kabupaten); Provinsi Sumatera Utara (1 Kabupaten); Provinsi Sulawesi Tengah (1 Kota); Provinsi Sulawesi Tenggara (1 Kabupaten); Provinsi Maluku Utara (1 Kabupaten); Provinsi Lampung (1 Kabupaten); Provinsi Papua Barat (1 Kabupaten)

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	Pusat dan 34 Provinsi
2.	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Meningkatnya kualitas Layanan Perizinan secara elektronik	Pusat dan 34 Provinsi
3.	Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis b. RTR KSN yang dipantau dan dievaluasi kesesuaiannya dengan Perpres c. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi d. Tersedianya data PMTB yang telah didisagregasi berdasarkan institusi (pemerintah, swasta, dan BUMN) dan berdasarkan sektor yang terdiri dari 17 lapangan usaha e. Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi investasi daerah dan tersedianya sistem informasi untuk percepatan proyek infrastruktur 	Pusat dan 34 Provinsi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4.	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya penanganan pengaduan konsumen di sektor prioritas b. Implementasi competition compliance oleh pelaku usaha di sektor prioritas c. Implementasi manual kebijakan persaingan di 10 K/L/I/D d. Pengembangan indeks persaingan usaha e. Terlaksananya penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat 	Pusat dan 34 Provinsi
5.	Iklm Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang didukung oleh sistem informasi TKA online terpadu; b. Meningkatnya kualitas dan transparansi sistem pengawasan ketenagakerjaan; c. Terlaksananya perundingan bipartit di tingkat perusahaan dengan mengedepankan prinsip negosiasi yang beritikad baik; d. Terlaksananya revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU 40/2004 tentang SJSN. 	34 Provinsi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
6.	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpetakannya potensi wilayah/lokal dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian tenaga kerja berdasarkan potensi wilayah; b. Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia berdasarkan kerangka kualifikasi dan okupansi; c. Meningkatnya peran industri dalam penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi, serta dalam pelaksanaan diklat; d. Meningkatkan kompetensi dan kuantitas instruktur dan tenaga pelatihan; e. Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja di lembaga diklat sesuai kebutuhan industri; f. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; g. Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja; h. Terlaksananya pemagangan berbasis kompetensi di industri; i. Meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten; j. Terbangunnya bengkel pelatihan sebagai tempat pelatihan bersama; k. Tersusunnya skema dana pengembangan pelatihan. 	34 Provinsi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
7.	Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja	a. Meningkatnya keterhubungan informasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja dengan prioritas di kawasan industri.	34 Provinsi
8.	Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri	a. Meningkatnya jumlah industri sedang dan besar b. Tumbuhnya industri kecil c. Meningkatnya daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)	34 Provinsi
9.	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	a. Meningkatnya pertumbuhan PDB ekonomi kreatif b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan keahlian di bidang ekonomi kreatif c. Meningkatnya nilai ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif	34 Provinsi
10.	Pengembangan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah		

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA
PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan Fasilitas Ekspor	<ul style="list-style-type: none">a. Pengembangan sistem fasilitas pembiayaan perdaganganb. Pengembangan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM)c. Terlaksananya integrasi antara INATRADE dan INSWd. Peningkatan kemudahan layanan fasilitas ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negerie. Penerbitan 20.000 dokumen Laporan Surveyor (LS) bagi industri kecil produk industri kehutanan	Pusat dan 34 Provinsi
2.	Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya infrastruktur pengujian kualitas dan standar produk eksporb. Meningkatnya pengakuan standar Indonesia oleh negara mitrac. Tersedianya informasi terkait standar dan mutu untuk 8 negara mitra tujuan ekspord. Pengembangan 50 desain produk ekspor dan 50 merk produk ekspor bagi UMKM dan Koperasi	Pusat dan 34 Provinsi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor b. Tersedianya 1 FTA Centre dan 4 Pusat FTA Daerah c. Pengembangan citra produk Indonesia (nation branding) d. Terlaksananya promosi dagang luar negeri dan Trade Expo Indonesia e. Tersedianya 2 Pusat Promosi Ekspor Regional di daerah dan 3 marketing point di wilayah perbatasan f. Tersedianya informasi dan analisa pasar ekspor (customer service center) g. Pendidikan dan pelatihan ekspor bagi eksportir pemula 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat b. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar c. Pusat d. Pusat e. Pusat promosi ekspor di Makassar dan Bali Marketing point di Skow, Tarakan, dan Nunukan f. Pusat g. Pusat
4.	Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekspor jasa b. Tersedianya statistik perdagangan jasa 	Pusat dan 34 Provinsi

Prioritas Nasional Ketahanan Energi

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir	<p>a. Terbangunnya pembangkit listrik berbasis hidro, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah PLTMH yang terbangun sebanyak 3 unit, ii. Jumlah PLTM yang terbangun sebanyak 2 unit, iii. Jumlah dokumen Pra FS/FS dan DED PLTM dan PLTMH yang tersusun sebanyak 3 FS/DED, iv. Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di kawasan konservasi non taman nasional sebesar 10.000 KW, v. Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di taman nasional sebesar 2.400 KW. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kab.Pegunungan Bintang-Oksibil, Kab. Puncak-Ilaga, ii. Kab. Toba Samosir, Kab. Pidie Jaya, Kab. Landak iii. Prov. Lampung, NTT, Gorontalo iv. - v. TN Kayan Mentarang (Kaltara), TN Betung Kerihun (Kalbar), TN Bukit Baka Bukit Raya (Kalbar), TN Rawa Aopa Watumohai (Sultra)
		<p>a. Terwujudnya pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah lokasi Mineral Logam Tanah Jarang (REE) yang dieksplorasi sebanyak 1 lokasi, ii. Jumlah data gempa (seismik) dan geodetik (Data Pangkalan Data Tapak RDE) sebanyak 7 paket data, iii. Penyiapan teknis infrastruktur pembangunan PLTN dalam 6 dokumen teknis, iv. Jumlah kajian pengembangan teknologi dan keselamatan reaktor nuklir sebanyak 2 kajian, v. Jumlah perizinan dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor daya sebanyak 1 perizinan, vi. Jumlah implementasi roadmap pembangunan PLT Nuklir sebanyak 1 roadmap. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kab.Ketapang ii. Pusat iii. Prov. Kepulauan Riau, Kab. Jepara, Prov. Bangka Belitung, Pusat iv. Pusat v. Pusat vi. Pusat
2.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	<p>a. Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah PLTP skala kecil yang terbangun sebanyak 2 unit prototipe. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kab. Garut
		<p>a. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, dengan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah WKP yang dilelang sebanyak 5 WKP, ii. Jumlah WKP yang baru sebanyak 1 WKP, iii. Jumlah rekomendasi hasil survei penyelidikan sumber daya dan cadangan panas bumi sebanyak 16 rekomendasi. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Prov. Sumatera Selatan, NTT, Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat ii. Prov. Sumatera Barat iii. Pusat
		<p>a. Meningkatnya teknologi dan kemampuan SDM dalam negeri di bidang panas bumi</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jumlah pendidikan dan pelatihan bidang panas bumi (EBTKE) sebanyak 20 pendidikan dan pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI (2/2) PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
3.	Pengembangan Bioenergi	a. Terwujudnya pembangunan infrastruktur bioenergi, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah PLT Biogas dari limbah sawit yang terbangun sebanyak 1 unit, ii. Hasil inovasi teknologi limbah padat sawit untuk energi sebanyak 1 pilot project, iii. Jumlah pilot plant inovasi teknologi bioenergi sebanyak 1 unit, iv. Jumlah limbah industri yang dimanfaatkan sebagai sumber energi sebanyak 500 ton, v. Jumlah limbah non B3 yang dimanfaatkan melalui pembangunan reaktor biomassa sebanyak 100 ton, vi. Jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif sebanyak 5.000 liter per hari, vii. Model pengembangan bioenergi berbasis tanaman lokal (<i>mobile plant biodiesel multifeed stock</i>) yang dioptimalisasikan dengan target produksi sebanyak 500 liter per hari di 3 lokasi, viii. Hasil inovasi teknologi gasifikasi dan biomethanol/bioethanol sebanyak 1 pilot plant. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Pusat ii. Pusat iii. Pusat iv. Kab. Katingan v. Kab. Cilacap vi. Kab. Gresik vii. Prov. Papua, D.I Yogyakarta, NTB viii. Pusat
4.	Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi	a. Tersusunnya regulasi terkait insentif untuk industri penggerak EBT dalam negeri. <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah regulasi insentif pajak untuk Industri Dalam Negeri Penggerak EBT sebanyak 1 rancangan regulasi, ii. Jumlah paket kebijakan industri EBT dalam negeri sebanyak 1 paket. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Pusat ii. Pusat
		a. Meningkatkan teknologi pengembangan EBT dan konservasi energi dalam negeri <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah paket revitalisasi sarana pengujian kualitas teknologi solar PV yang dilaksanakan sebanyak 1 paket revitalisasi peralatan, ii. Jumlah paket revitalisasi fasilitas laboratorium riset energi, termasuk teknologi bersih, teknologi biomassa dan energi terbarukan lainnya sebanyak 3 cluster peralatan, iii. Jumlah riset pengembangan energi terbarukan bagi industri dalam negeri, 	<ol style="list-style-type: none"> i. Pusat ii. Pusat iii. Pusat
5.	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (<i>Small Grid System</i>)	Terwujudnya pemanfaatan teknologi <i>Small Grid System</i> <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah unit pilot plant <i>Smart Micro Grid</i> kawasan perdesaan dan/atau perkotaan yang terbangun sebanyak 1 unit, ii. Jumlah PLTS Terpusat <i>Offgrid</i> di wilayah perbatasan sebanyak 1 unit. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Prov. NTT ii. Prov. NTT
		Terwujudnya penyediaan energi <i>pra elektrifikasi</i> <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 240.229 unit, 	<ol style="list-style-type: none"> i. Prov. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua
6.	Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien	a. Terwujudnya penerapan konservasi energi dan teknologi energi bersih <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah objek <i>Investment Grade Audit</i> (IGA) sebanyak 6 objek, ii. Jumlah jenis peralatan yang menjadi objek pelaksanaan mandatory Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi sebanyak 2 jenis peralatan, iii. Jumlah dokumen FS untuk implementasi teknologi <i>Under Ground Coal Gasification</i> (UCG) di Indonesia sebanyak 1 dokumen, iv. Jumlah hasil inovasi teknologi testing protokol pengujian peralatan listrik sebanyak 1 unit alat uji. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Seluruh Indonesia ii. Seluruh Indonesia iii. Pusat iv. Pusat
7.	Penyempurnaan <i>feed-in tariff</i> , subsidi, dan kelembagaan EBT	Tersusunnya formulasi harga, besaran, serta regulasi penerapan subsidi/insentif pengembangan EBT, dengan indikator: Jumlah regulasi pembentukan dana ketahanan energi sebanyak 1 regulasi.	<ol style="list-style-type: none"> i. Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI (1/2) PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

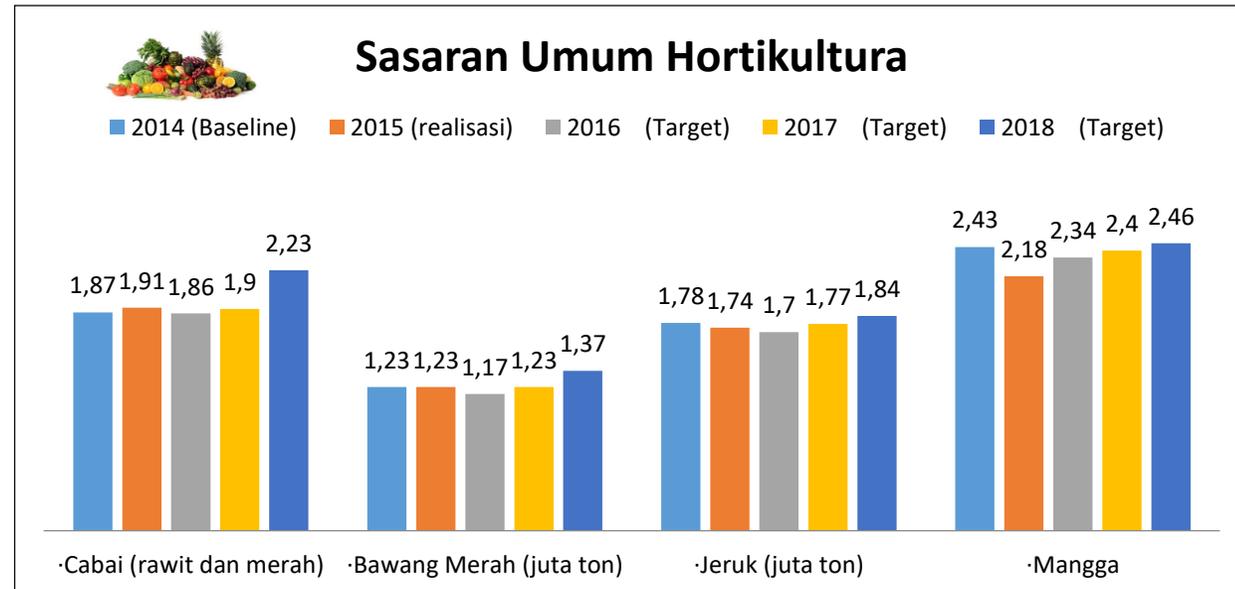
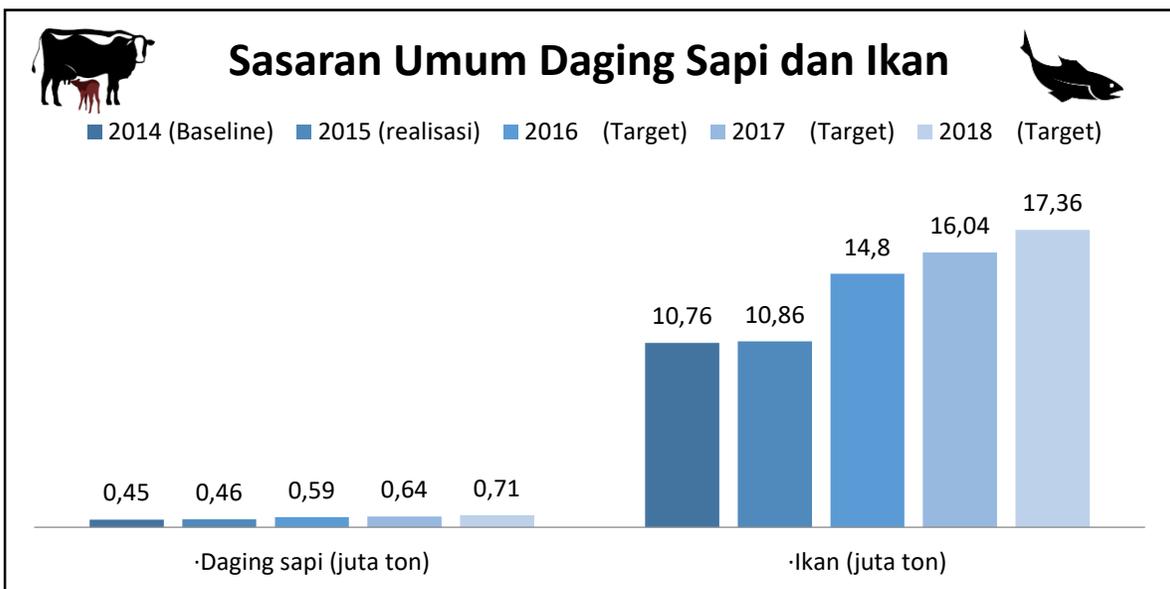
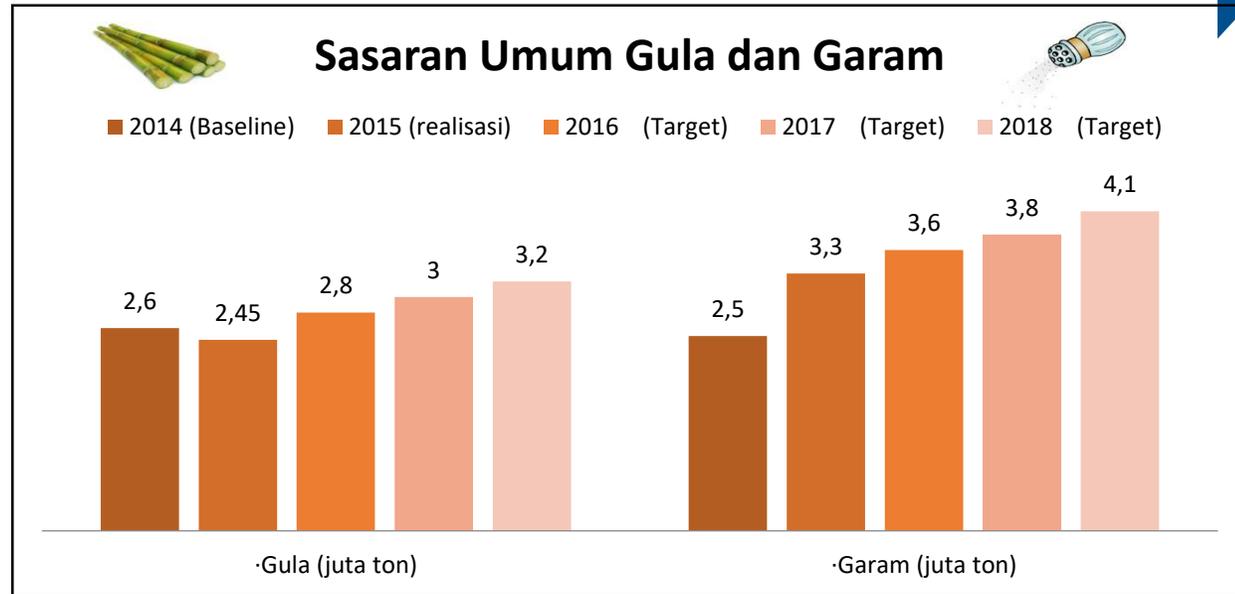
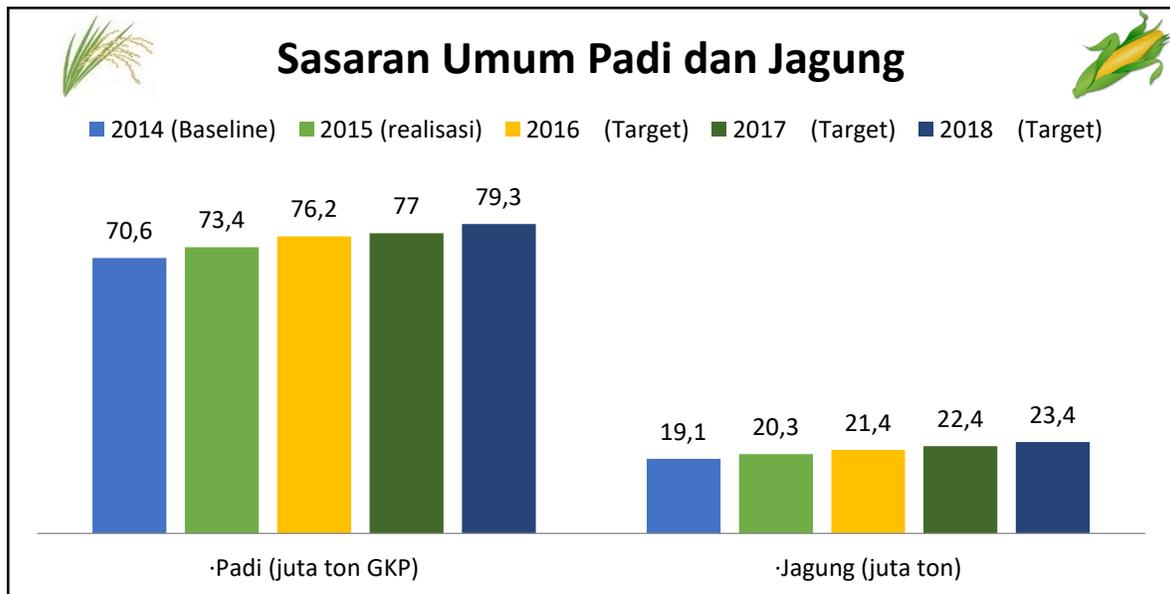
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik	a. Terbangunnya pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah kapasitas pembangunan pembangkit listrik yang dibangun sebesar 5.956 MW, ii. Jumlah panjang jaringan transmisi yang dibangun sepanjang 12.681 kms, iii. Jumlah kapasitas gardu induk yang dibangun sebesar 34.552 MVA, iv. Jumlah panjang jaringan distribusi yang dibangun sepanjang 24.938 kms, v. Jumlah kapasitas gardu distribusi yang dibangun sebesar 363 MVA, vi. Data dan penyiapan informasi geospasial tematik ketenagalistrikan sebanyak 1 peta, vii. Jumlah kebijakan terkait pemantauan dan pengendalian pembangunan ketenagalistrikan sebanyak 3 kebijakan, viii. Jumlah provinsi yang menerima bimtek penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 34 provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Pusat ii. Pusat iii. Pusat iv. Pusat v. Pusat vi. Pusat vii. Pusat viii. Pusat
		a. Terwujudnya perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah rumah tangga yang menerima perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik sebanyak 195.000 RTS. 	Pusat
		a. Terlaksananya penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah kebijakan terkait harga dan subsidi listrik sebanyak 1 kebijakan. 	i. Pusat
2	Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi	a. Terbangunnya infrastruktur gas bumi <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun sebanyak 100.350 SR, ii. Ruas pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi yang dibangun sepanjang 13.044 km, iii. Jumlah instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 6 unit, iv. Jumlah instalasi pengujian izin tipe meter gas dan instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 3 unit, v. Jumlah pipa transmisi jaringan gas yang dibangun sepanjang 38 km, vi. Pemutakhiran Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 1 dokumen. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Kota Semarang (6350), Kab Blora (5000), Kab Sorong (5000), Kota Balikpapan (7000), Kab Probolinggo (5000), Kab Prabumulih (6000), Kota Sorong (4000), Kab Bekasi (5000), Kota Pasuruan (6000), Kota Bontang (8000), Kab Banyuasin (5000), Kota Medan (5000), Kab Sidoarjo (8000), Kota Samarinda (5000), Kota Tarakan (6000), Kab Wajo (4000), Kab Banggai (5000), Kab Penajam Paser Utara (5000) ii. Prov. Sumut, Sumsel, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Lampung, Kepri, Jateng iii. Pusat iv. Pusat v. Kab Tuban (5 Km), Kota Samarinda (8 Km), Kota Sorong (25 Km) vi. Pusat
		a. Terbangunnya infrastruktur minyak bumi <ol style="list-style-type: none"> i. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak <i>grass root</i> dan RDMP sebanyak 1 dokumen, ii. Pembangunan tangki Penyimpanan BBM sebanyak 14 unit. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Pusat ii. Pusat
		a. Terlaksananya konversi BBM ke BBG <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 9.538 unit, ii. Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.800 unit. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Prov. Bali, Sulsel, Kaltim, Sultra, Gorontalo, Sulbar, NTB ii. Cirebon, Indramayu, Lampung, Surabaya, Gresik, Semarang dan Jakarta
		a. Terlaksananya penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran <ol style="list-style-type: none"> i. Jumlah paket perdana LPG 3 kg untuk Rumah Tangga dan usaha mikro sebanyak 100.150 paket, ii. Jumlah pelaksanaan distribusi tertutup LPG tabung 3 kg sebanyak 1 paket. 	<ol style="list-style-type: none"> i. Jayapura dan Manokwari ii. Pusat

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI (1/2)
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
3.	Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi	<p>a. Terselenggaranya kegiatan eksplorasi migas untuk peningkatan penemuan cadangan baru</p> <p>i. Survei Pengkayaan Data Dasar ESDM dan Konsepsi Geologi Kelautan Strategis sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (2200 KM Seismik 2D),</p> <p>ii. Survei Energi Migas Kelautan sebanyak 1 rekomendasi kebijakan (4000 KM Seismik 2D),</p> <p>iii. Akuisisi Seismik 2D di Selabangka dan Singkawang,</p> <p>iv. Data Seismik 2D sebanyak 1 referensi teknis survei.</p>	<p>i. 2 lokasi di Pulau Kai – Weber Deep, Kep. Seribu</p> <p>ii. 3 lokasi di Tamerau – Papua Barat, Waipoga – Papua, Kangean Masalembu</p> <p>iii. Prov. Sultra dan Kalbar</p> <p>iv. Pusat</p>
4.	Pembentukan cadangan penyangga energi	<p>a. Tersedianya cadangan penyangga energi</p> <p>i. Rekomendasi strategis penyediaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga Energisebanyak 2 paket kebijakan.</p>	<p>i. Pusat</p>
5.	Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	<p>a. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional dan non konvensional</p> <p>i. Jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan sebanyak 8 WK,</p> <p>ii. Jumlah WK Migas non konvensional yang ditawarkan sebanyak 3 WK,</p> <p>iii. Jumlah regulasi migas yang direvisi (UU Migas) sebanyak 1 rancangan PP,</p> <p>iv. Jumlah survei keprospekan migas sebanyak 9 rekomendasi WK,</p> <p>v. Produksi minyak bumi dengan metode EOR menggunakan injeksi alkoksi sulfonate berbasis nabati untuk injeksi kimia sebanyak 1 usulan paten.</p>	<p>i. Prov. Lampung, Kaltara, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Papua, Papua Barat</p> <p>ii. South Bengkulu, Bengkulu, East Bengkulu</p> <p>iii. Pusat</p> <p>iv. Arafura Barat, Sapurote, Selaru Selatan 1, Selaru Selatan 2, Arafura Selatan, Kaimana, Timor Barat, Sumatera Tengah, Kutai Timur</p> <p>v. Pusat</p>
6.	Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi	<p>a. Meningkatnya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri</p> <p>i. Pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik tahun 2018 sebesar 131 juta ton sebanyak 1 kebijakan,</p> <p>ii. Pengendalian produksi batubara tahun 2018 sebesar 406 juta ton sebanyak 1 rekomendasi.</p>	<p>i. Pusat</p> <p>ii. Pusat</p>
		<p>a. Meningkatnya pemanfaatan alokasi gas domestik</p> <p>i. Intensifikasi pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga, transportasi dan industri sebanyak 2 rekomendasi.</p>	<p>i. Pusat</p>

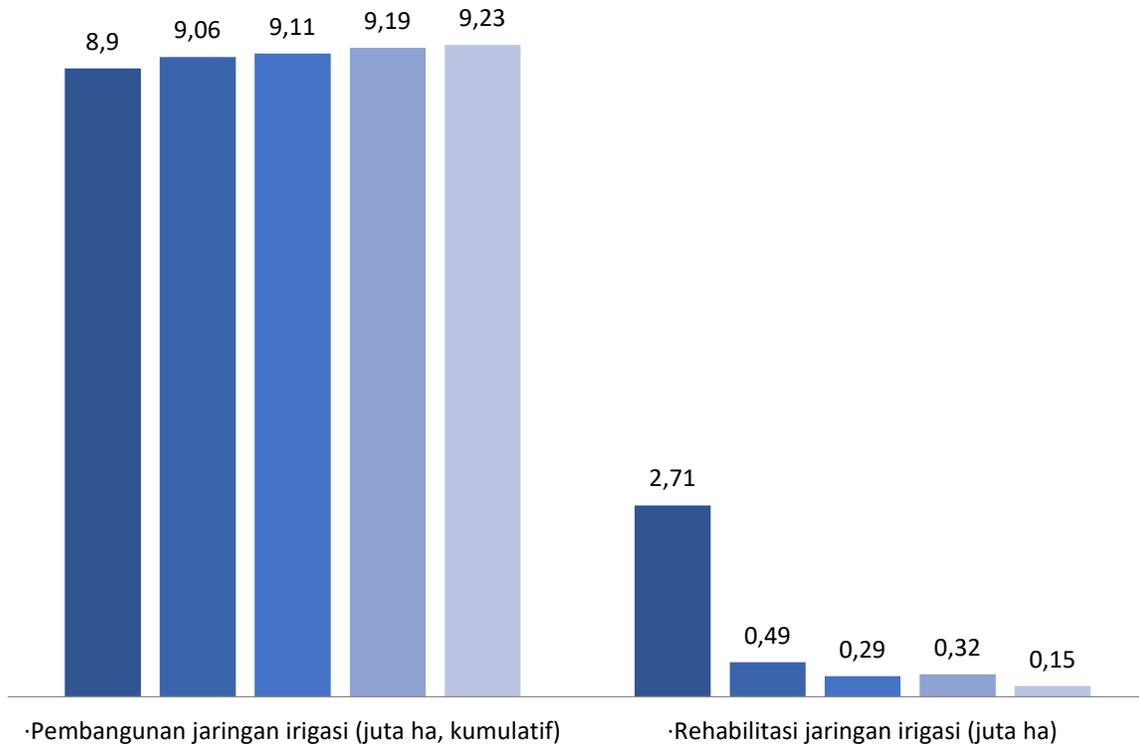
Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

SASARAN UMUM: PENINGKATAN PRODUKSI



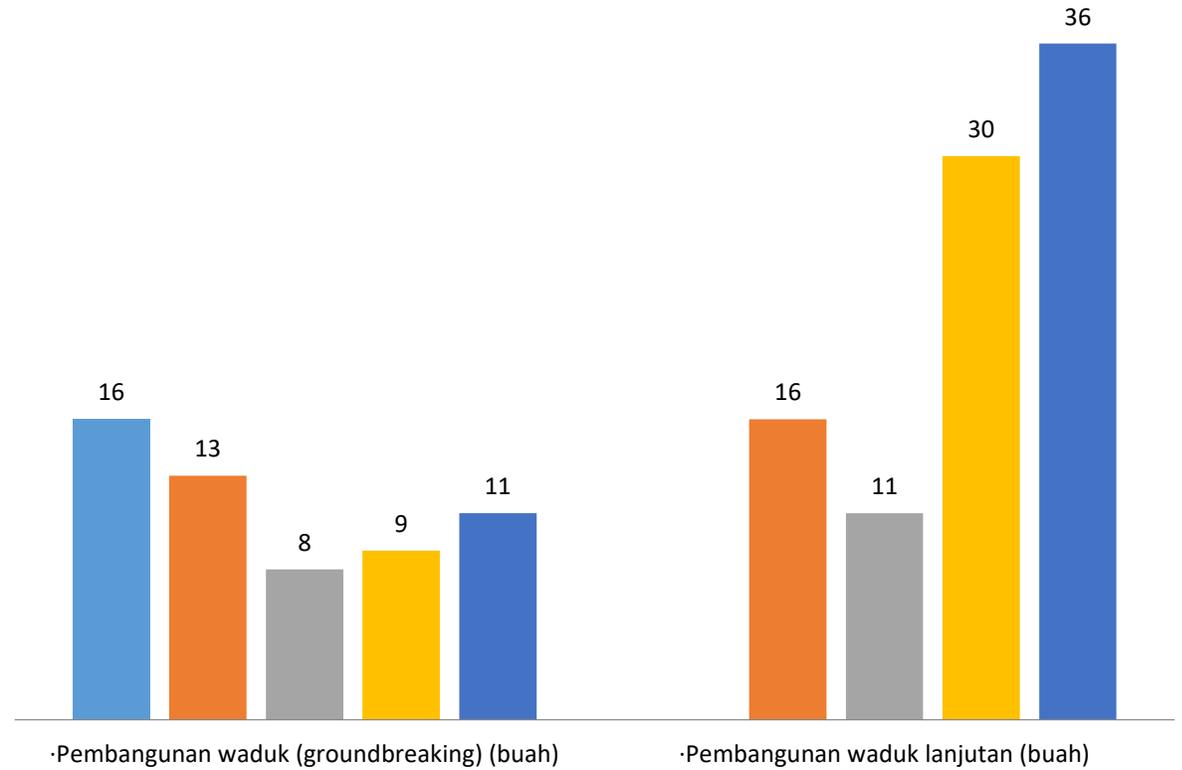
Sasaran Umum Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

■ 2014 (Baseline) ■ 2015 (realisasi) ■ 2016 (Target) ■ 2017 (Target) ■ 2018 (Target)



Sasaran Umum Pembangunan Waduk

■ 2014 (Baseline) ■ 2015 (realisasi) ■ 2016 (Target) ■ 2017 (Target) ■ 2018 (Target)

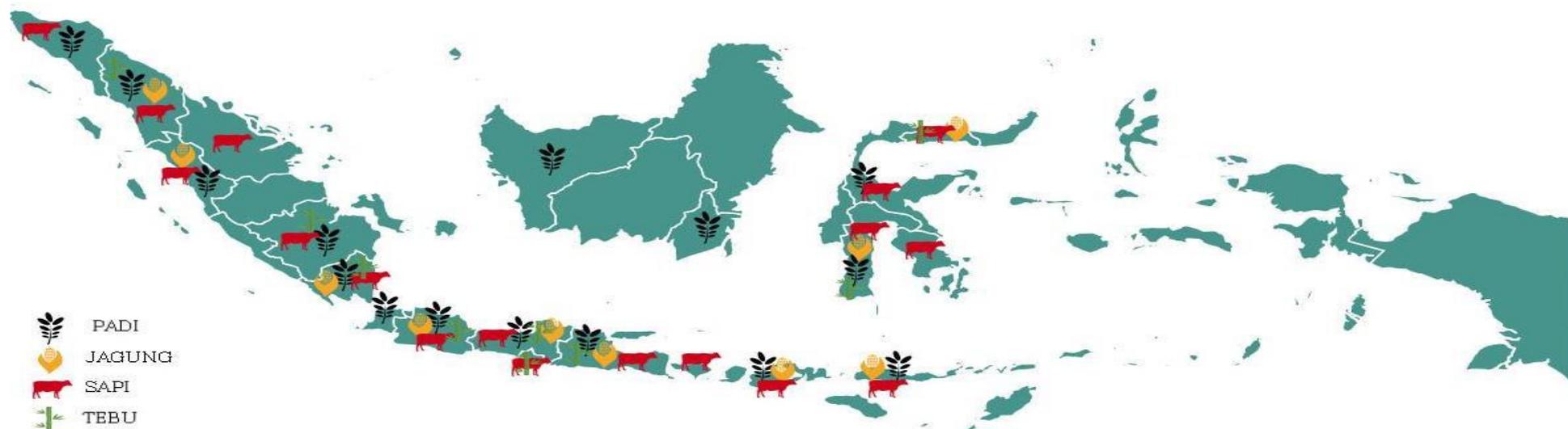


SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Peningkatan produksi padi	Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyak benih sumber padi 294 hektar	15 propinsi sentra produksi padi
2.	Peningkatan produksi jagung	Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyak benih sumber jagung 93 hektar	10 propinsi sentra produksi jagung
3.	Peningkatan produksi gula	Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih perkebunan 588 hektar	9 propinsi sentra produksi tebu
4.	Peningkatan produksi daging sapi	Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Hijauan pakan ternak 7 ribu hektar; Pengamanan penyakit hewan 7,3 juta dosis	13 sentra/kawasan sapi potong
5.	Peningkatan produksi ikan dan garam	1048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990 unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10 kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan	Ikan: 11 WPP dan 34 propinsi, Garam: 6 propinsi
6.	Peningkatan produksi hortikultura	Kawasan bawang merah 6.550 ha; kawasan cabai 10.450 ha; benih bawang merah 3.008 ton; benih cabai 10 juta batang; kawasan jeruk 3.460 ha; benih jeruk 1 juta batang; kawasan buah lainnya 11.000 ha; benih buah lainnya 2,1 juta batang	Daerah sentra hortikultura

HIGHLIGHT PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN - PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN -

LOKASI SENTRA PRODUKSI PANGAN



Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
Peningkatan produksi padi	Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyak benih sumber padi 294 hektar	15 propinsi sentra produksi padi
Peningkatan produksi jagung	Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyak benih sumber jagung 93 hektar	10 propinsi sentra produksi jagung
Peningkatan produksi gula	Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih perkebunan 588 hektar	9 propinsi sentra produksi tebu
Peningkatan produksi daging sapi	Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Hijauan pakan ternak 7 ribu hektar; Pengamanan penyakit hewan 7,3 juta dosis	17 sentra/kawasan sapi potong
Peningkatan produksi ikan dan garam	1048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990 unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10 kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan	Ikan: 11 WPP dan 34 propinsi, Garam: 6 propinsi
Peningkatan produksi hortikultura	Kawasan bawang merah 6.550 ha; kawasan cabai 10.450 ha; benih bawang merah 3.008 ton; benih cabai 10 juta batang; kawasan jeruk 3.460 ha; benih jeruk 1 juta batang; kawasan buah lainnya 11.000 ha; benih buah lainnya 2,1 juta batang	Daerah sentra hortikultura

SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan jaringan irigasi: 30 ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi: 100 ribu ha.	34 propinsi
2.	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung	Waduk: ground breaking 11, on going 36, pembangunan embung dan sumber air untuk pertanian: 3.000, PUPR: 23 unit.	34 propinsi
3.	Perbaikan data statistik pangan	Survey tanaman pangan: 151.380 ubinan, survey konversi gabah ke beras untuk 27.501 sampel: 27.501 sampel, kerangka sampel area: 21.845 segmen; kajian stok sumber daya perikanan di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NRI; kajian stok sumber daya perikanan di 6 Perairan Umum Daratan (PUD)	34 propinsi
4.	Pembangunan sarana pasca panen	Cold storage 2 unit, revitalisasi 49 penggilingan padi	49 kab/kota
5.	Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian	Pembangunan 285 unit pasar rakyat	34 propinsi
6.	Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat	Pemberdayaan pekarangan Pangan 3.000 desa	34 propinsi
7.	Pembangunan alat dan mesin pertanian	Penyaluran alsin pertanian 40.000-50.000 unit	Di wilayah yang belum jenuh bantuan alsintan
8.	Perluasan lahan pertanian	Cetak sawah 80.000 ha	Prioritas luar jawa dan bali

Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan



SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan	a. Terlaksananya subsidi pangan bagi 5,5 juta keluarga miskin dan rentan di 321 Kabupaten	34 Provinsi
		b. Terlaksananya bantuan pangan non tunai di seluruh Kota dan sebagian Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	34 Provinsi
2.	Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	a. Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga miskin (PKH)	514 Kab/Kota
3.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	a. Terlaksananya bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 96 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir)	34 Provinsi
		b. Terlaksananya perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di 34 provinsi.	34 Provinsi
		c. Penyesuaian target kepesertaan SJSN Ketenagakerjaan per segmen peserta menjadi Penerima Upah sebesar 19,476,319; Jasa Konstruksi sebesar 7,755,584; Bukan Penerima Upah sebesar 2,420,928; dan total target semesta sebesar 29,652,831.	34 Provinsi
4.	Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah	a. Tersalurkannya bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin	34 Provinsi
		b. Terlaksananya fasilitasi anak tidak sekolah bagi 90.000 anak tidak sekolah dari keluarga miskin dan rentan	34 Provinsi
5,	Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran	a. Terlaksananya subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA bagi 23,2 juta rumah tangga miskin dan rentan	34 Provinsi
		b. Terlaksananya subsidi elpiji 3 Kg bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan dan 2 3 juta UKM	34 Provinsi

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penyediaan Layanan Dasar	a. Pembangunan rumah susun sederhana sewa sebanyak 10.800 unit satuan rumah susun	34 Provinsi
		b. Terbangunnya sebanyak 10.300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan, Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Perbatasan antar negara	34 Provinsi
		c. Penciptaan lapangan kerja sementara bagi 77.140 orang melalui padat karya infrastruktur, termasuk pembangunan 20 unit jembatan gantung di daerah terpencil.	34 Provinsi
		d. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi 28.316 jiwa penyandang disabilitas dan 46.377 jiwa lanjut usia	34 Provinsi
		e. Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.000 unit	34 Provinsi
2.	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	a. Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	130 Kab/Kota
3.	Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan	a. 82% anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	34 Provinsi
		b. Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dengan 35 K/L untuk pelayanan publik.	Pusat

Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman



SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS AKSESIBILITAS PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

No	Kegiatan/Proyek Prioritas	Sasaran Pembangunan 2018
AKSESIBILITAS		
1	Dukungan untuk Kawasan Perbatasan	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan 466 kilometer jalan paralel perbatasan (Kalimantan, NTT, dan Papua)• Pembangunan akses jalan di daerah tertinggal untuk membuka isolasi wilayah di 82 kabupaten tertinggal
2	Dukungan untuk Daerah Tertinggal	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan subsidi perintis angkutan jalan di 300 trayek• Tersedianya subsidi perintis kereta api di 6 lintas• Pembangunan 16 dermaga penyeberangan• Penyediaan subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan di 249 trayek• Pembangunan lintas penyeberangan (Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke Tengah)• Penyediaan subsidi bagi 105 trayek angkutan laut perintis• Pengembangan 34 bandara di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal• Penyediaan subsidi bagi 252 rute penerbangan perintis• Penyediaan 3 lokasi hub jembatan udara di Papua (Wamena, Timika, dan Dekai)

No	Kegiatan/ProyekPrioritas	Sasaran Pembangunan 2018
Konektivitas		
1	Dukungan untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan lintas utama (jalan trans), jalan arteri, jalan tol, dan jalan akses menuju kawasan perekonomian strategis, bandara, dan pelabuhan. • Pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis.
2	Jalur Utama Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan manajemen dan pengelolaan pelabuhan. • Pengembangan reaktivasi jalur kereta api regional (KA Sumatera, KA Jawa, KA Kalimantan, dan KA Sulawesi) • Pengembangan dan reaktivasi KA menuju pelabuhan dan bandara.
3	Integrasi Antar Moda	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>coastal shipping</i>. • Pembangunan dan pengembangan simpul-simpul transportasi.

No	Kegiatan/Proyek Prioritas	Sasaran Pembangunan 2018
Transportasi Perkotaan		
1	Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 7 wilayah perkotaan.• Pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di 23 wilayah perkotaan.
2	Pengembangan Jalan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan subsidi angkutan KA perkotaan• Penyediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (ATCS).• Peningkatan rasio jalan perkotaan menjadi sekitar delapan persen melalui pembangunan underpass/flyover, jalan lingkar, dan jalan tol.• Peningkatan kecepatan rata-rata jalan perkotaan menjadi 17 kilometer/jam.

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

No	Kegiatan/Proyek Prioritas	Sasaran
1	Pembangunan jaringan pitalebar	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 479 kabupaten/kota (93%) Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel
2	Akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersil	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah BTS yang dibangun 125 unit Jumlah penyediaan akses internet broadband 800 lokasi Jumlah Desa Broadband Terpadu 125 lokasi
3	Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 92% dan 78% Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 20 lokasi
4	Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,2 (skala 4,0) Pemantauan titik strategis jaringan internet pada 49 titik
5	Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Pilot telemedicine Jaringan pendidikan nasional

Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	- Revisi dan penyusunan peraturan perundangan di bidang pertanahan sebanyak 1 Paket	Pusat
		- Terlaksananya penanganan kasus pertanahan sebanyak 181 Kasus	34 Provinsi
		- Terlaksananya kegiatan beracara di pengadilan pada Kanwil dan Kantah sebanyak 556 Kasus	34 Provinsi
2	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	- Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IP4T) sebesar 1 Juta Bidang	34 Provinsi
		- Terlaksananya inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Bidang	34 Provinsi
		- Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan (SP)	34 Provinsi
		- Penyelesaian perubahan kawasan hutan untuk TORA seluas 1.630.421 Ha	24 Provinsi
		- Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	13 Provinsi
		- Pemutakhiran data dan Peta TORA di Kawasan Hutan	26 Provinsi
		- Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km	24 Provinsi
		- Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan	26 Provinsi
3	Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria	- Terlaksananya legalisasi aset tanah Melalui Sertifikasi dan Redistribusi tanah sebanyak 3,02 Juta Bidang Tanah	34 Provinsi
		- Tersusunnya Peta Dasar Pertanahan sebesar 6,30 Juta Hektar	34 Provinsi
		- Tersusunnya Peta Bidang Tanah sebesar 2,69 Juta Bidang	34 Provinsi
		- Tersedianya juru ukur pertanahan sebanyak 3.000 Orang	Pusat
		- Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan sepanjang 11.667 Km	Pusat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria	- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada 34 Provinsi	34 Provinsi
		- Tersedianya peta rupabumi indonesia termutakhirkan	Pusat
		- Tersedianya Data Geospasial Dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia termutakhirkan	Pusat
		- Terlaksananya Asistensi/Supervisi dalam penyusunan peta dasar pertanahan	Pusat
		- Tersusunnya Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000	Pusat
		- Tersusunnya Peta Penutup Lahan skala 1:50.000	Pusat
		- Tersusunnya Peta Sistem Lahan skala 1:50.000	Pusat
		- Tersedianya IGT Potensi SDA Pulau-Pulau Kecil	Pusat
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	- Terbentuknya 172 Kelompok Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria	34 Provinsi
5	Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah	- Terbentuknya gugus tugas pelaksana Reforma Agraria di Pusat dan 34 Provinsi.	Pusat dan 34 Provinsi
		- Tersusunnya Perpres terkait lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Pusat
		- Terbentuknya 1 lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Pusat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Terbangun dan beroperasinya sekolah berpola asrama	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terbangunnya dan dikembangkannya SMK sesuai dengan potensi unggulan wilayah lokal	
		Terbangunnya dan terlasaksananya revitalisasi ruang kelas baru	
		Menurunnya angka tuna aksara	
		Diterapkannya pendidikan kurikulum kontekstual Papua	
		Tersedianya guru berkualitas dan tambahan kuota guru	
		Terlaksananya kebijakan afirmasi untuk OAP untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi	

Kementerian PPN/RSHP
SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat	
		Terlaksananya dan beroperasinya pembangunan malaria center	
		Turunnya angka malaria, dan prevalensi HIV /AIDS, dan penyakit endemik dan epidemik lainnya	
		Terbangun dan beroperasinya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (<i>telemedicine</i>) di RS Sorong dan RS Dok II Jayapura	
		Terlaksananya penugasan tenaga kesehatan secara <i>team based</i> (Nusantara Sehat) minimal 5 orang Papua dan Papua Barat sebanyak 26 tim (234 orang)	

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya integrasi Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Papua Sehat	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terpenuhinya kebutuhan penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/JKN	
		Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH)	
		Tersedianya bantuan permodalan UMKM	



SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4	Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat	Terlaksananya cetak sawah untuk mendukung produksi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan wilayah adat	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terbangunnya irigasi di Kabupaten Merauke	Merauke
		Terbangunnya Bendungan Baliem	Provinsi Papua
		Pengembangan tanaman kelapa	Sarmi
		Pengembangan Tanaman kopi	Wilayah adat La Pagoo dan MeePago
		Pengembangan Tanaman kakao	Wilayah adat Mamta
		Pengembangan tanaman karet	Wilayah adat Mamta
		Terlaksananya penguatan sarana/prasarana pengolahan hasil peternakan;	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terbangun dan berkembangnya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak, Timika dan Merauke;	Biak Numfor, Timika dan Merauke
		Terlaksananya peningkatan berwirausaha untuk OAP dan Mama-Mama Papua.	Provinsi Papua dan Papua Barat

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
5	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	Tersedianya bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni dan sehat	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	
		Terbangunnya SPAM Kawasan Khusus (termasuk Pengembangan SPAM mendukung KSPN)	
		Terbangunnya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III)	
		Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di kawasan perdesaan	
		Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di pulau kecil	
		Terbangunnya sarana air bersih	
		Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah setempat skala kota	
		Terpasangnya Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita	
		Terbangunnya PLT Minihidro	
		Terbangunnya PLTS	

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
6	Pengembangan konektivitas wilayah	Terbangunnya jalan dan jembatan Trans Papua	Kab. Jayawijaya, Kab.Puncak, Kab. Deiyai
		Dikembangkannya bandar udara	Kab. Asmat Kab. Puncak, Kab. Mimika, Kab. Jayapura
		Terbangun dan dikembangkannya pelabuhan	Kab. Peg. Bintang, Kab. Jayawijaya, Kab. Nduga Kab. Kep. Yapen, Kab. Jayapura, Kab.Raja Ampat, Kab. Sorong
		Terbangunnya BTS di daerah <i>blankspot</i> terutama di daerah 3T	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Penyediaan akses internet di wilayah telekomunikasi	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terbangunnya Desa Broadband Terpadu	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Tergelarnya Jaringan Serat Optik yang menghubungkan seluruh ibukota kabupaten/kota	Provinsi Papua dan Papua Barat

**SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
7	Penataan kelembagaan dan tata kelola	Terselesaikannya penyusunan 2 perdasu dan 2 Perdasus	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi/kabupaten/kota/distrik dalam peningkatan pelayanan dasar publik	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua dan Papua Barat
		Terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kontekstual Papua	Provinsi Papua dan Papua Barat

Prioritas Nasional Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit	Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit a. Meningkatnya latihan dan kesiapsiagaan OMSP b. Terjaminnya perumahan prajurit	Pusat
2	Pemenuhan MEF II	Meningkatnya Kesiapan Alutsista a. Meningkatnya keterpaduan Trimatra b. Meningkatnya pertahanan darat c. Meningkatnya pertahanan laut d. Meningkatnya pertahanan udara	Pusat
3	Pengembangan Industri Pertahanan	Meningkatnya kapasitas litbang pertahanan	Pusat
4	Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya Penjagaan dan Pengawasan Wilayah Perbatasan	Beberapa Provinsi

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik	Peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia	• Pusat
2	Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik	a. Konflik sosial tertangani secara koordinatif dan integratif b. Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme	• Pusat dan Daerah
3	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	a. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah b. Tersebarnya informasi yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3 T c. Meningkatnya kualitas konten informasi publik d. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	• Pusat dan Daerah
4	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Terwujudnya Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat melalui peningkatan indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri	• Pusat
5	Pemantapan Peran di ASEAN	Terwujudnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendukung sentralitas dan stabilitas kawasan serta kepentingan nasional	• Pusat
6	Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	Terwujudnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendukung sentralitas dan stabilitas kawasan serta kepentingan nasional	• Pusat
7	Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan	Terwujudnya Diplomasi Politik dan Keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia	• Pusat
8	Penguatan Diplomasi Maritim	Terwujudnya diplomasi maritim Indonesia yang kuat melalui peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen serta pembakuan nama pulau	• Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2) PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
9	Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	<p>Terwujudnya Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat b. Penanganan Kejahatan serta Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat c. Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat Peningkatan Kesejahteraan Personel Polri 	Pusat dan Daerah
10	Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia	<p>Meningkatnya Kapasitas Pengawasan Keamanan Laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Operasi Keamanan Laut di Wilayah Rawan b. Peningkatan Kemampuan Keamanan Laut 	Pusat
11	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	<p>Terwujudnya Masyarakat yang bebas narkoba:</p> <p>Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba</p>	Pusat
12	Intelijen dan Kontra Intelijen	<p>Menguatnya kapasitas keamanan siber dan intelijen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Deteksi Dini Keamanan Nasional b. Siber dan Persandian Negara 	Pusat

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas b. Terkendalinya overkapasitas penghuni di lembaga c. pemasyarakatan d. Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara Terpadu berbasis teknologi informasi e. Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi f. Terselenggaranya sistem pendidikan sistem peradilan pidana anak yang terpadu g. Menurunnya jumlah regulasi yang bermasalah dan/atau berpotensi bermasalah h. Terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat dan Daerah (34 Provinsi)
2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi b. Optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat
3	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	Terpenuhi Akses Masyarakat terhadap Hak atas Keadilan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpadu b. Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat dan Daerah (34 Provinsi)

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI (1/3)

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Perluasan Implementasi E-Government Yang Terintegrasi	a. Diterapkannya aplikasi e-gov berbagi pakai (e-Office, e- Planning, e-Budgeting, e-Performance, e-Manajemen Kepegawaian, e-Pengaduan) pada 623 K/L/D	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		b. Diterapkannya e-arsip di 142 K/L/D	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		c. Terintegrasinya Sistem Monev-Next Generation online PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta OM SPAN	Pusat
		d. Terintegrasinya e-planning, e-budgeting, e-manajemen kinerja antara Bappenas dengan Kemenkeu dan KemenPAN dan RB	Pusat
		e. Diterapkannya pelayanan publik online di 500 Unit Pelayanan Publik RSUD, PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres, Puskesmas, dan Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		f. Diterapkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di 15.554 Desa	18 provinsi (71 kabupaten)
2	Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik Dan Kapasitas Sdm Pelayanan	a. Diterapkannya standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan public	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		b. Meningkatnya kapasitas aparatur pelayanan publik pada masing-masing unit pelayanan publik	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		c. terselesaikannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		d. Berjalannya mall pelayanan publik yang terintegrasi	9 Daerah

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI (2/3)

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Penguatan Tatakelola Dan Manajemen Sdm Aparatur	a. Terlaksananya penataan kelembagaan LPNK dan LNS	Pusat
		b. Terbentuknya agen perubahan RB di K/L/Pemda	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		c. Tersusunnya Grand Design Public Administration	Pusat
		d. Terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan sistem merit ASN	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		e. Meningkatnya kapasitas ASN termasuk terpenuhinya minimum training rate ASN 20 jam/tahun	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		f. Terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		g. Meningkatnya nilai indeks RB Instansi Pemerintah	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		h. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		i. Tersusunnya kebijakan redistribusi ASN	Pusat dan daerah (34 Provinsi)

SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI (3/3)

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4	Peningkatan Integritas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	a. Pengawasan intern Proyek Strategis Nasional (PSN)	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		b. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju level 3	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		c. Perluasan cakupan produk dalam e-Catalogue	Pusat
		d. Meningkatnya kapasitas dan standarisasi LPSE	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		e. Meningkatnya disiplin dan integritas aparatur negara di seluruh K/L/D	Pusat dan daerah (34 Provinsi)
		f. Meningkatnya skor atas SAKIP K/L/D	Pusat dan daerah (34 Provinsi)

Prioritas Khusus : Persiapan Asian Games dan Asian Para Games

HIGHLIGHT PRIORITAS KHUSUS PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES dan ASIAN PARA GAMES 2018

Keppres No 2 Tahun 2016
(Kepanitiaan Asian Para Games 2018)

Keppres No 22 Tahun 2016
(Kepanitiaan Asian Games 2018)

Inpres No 2 Tahun 2016
(Dukungan Penyelenggaraan Asian Games 2018)



18th ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**

KEMENKO PMK	KEMEN PU & PR	KEMENHUB	KEMENKOMINFO	KEMENTAN
-------------	---------------	----------	--------------	----------

Fasilitasi kebijakan pelaksanaan Rencana Induk AG 2018

Pembangunan sarpras AG 2018 (GBK, Wisma Atlet, dll)

Penyediaan sarpras transportasi AG 2018

Perijinan broadcast, media center, jaringan, solusi TI, Sosialisasi AG 2018

Fasilitasi & pengawasan hewan dan produk hewan dalam AG 2018

KEMEN BUMN	KEMENDAGRI	KEMENLU	KEMENKUMHAM	KEMENKEU
------------	------------	---------	-------------	----------

- Promosi AG 2018 melalui BUMN,
- Hospitality* di bandara/ pelabuhan BUMN
- Sponsorship BUMN

Fasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah

Kerjasama dengan negara peserta AG 2018

Fasilitasi keimigrasian olahragawan & delegasi AG 2018

Fasilitasi duk. Teknis penganggaran dan kepabeanan

KEMENDIKBUD	KEMENKES	KEMEN PERINDUSTRIAN	KEMEN PERDAGANGAN	KEMEN PARIWISATA
-------------	----------	---------------------	-------------------	------------------

Fasilitasi atlet pelajar dan pelajar (dikdasmen) pendukung AG 2018

- Pengawasan & penyediaan layanan medis
- Fasilitasi RS
- Fasilitasi anti doping

Dukungan partisipasi industri nasional dalam AG 2018

Dukungan impor/ekspor Peralatan pertandingan/ peralatan kontingen AG 2018

Fasilitasi promosi AG 2018 didalam & luar negeri

KEMENPORA	TNI	POLRI	BPKP	LKPP
-----------	-----	-------	------	------

- Menyiapkan anggaran sukses prestasi AG 2018
- Memastikan pelaksanaan sesuai Rencana Induk AG 2018
- Pengawasan organisasi keolahragaan
- Laporan ke Presiden

Pengamanan Kepala Negara/Tamu Negara AG 2018, pembukaan/penutupan. Dukungan alutsista

Pengamanan venues, lokasi-lokasi pendukung, pengawalan VIP, pembukaan/penutupan, protokol keamanan, rekayasa lalu lintas

Pengawasan, akuntabilitas keuangan AG 2018

Pengawasan pengadaan barang/jasa AG 2018

BASARNAS	GUB. DKI	GUB. SUMSEL	GUB. JABAR	GUB. BANTEN
----------	----------	-------------	------------	-------------

Fasilitasi keadaan darurat atlet/pendukung lain dalam AG 2018

Membangun & menyiapkan velodrome, equestrian venues maupun infrastrukturnya (Koordinasi dengan INASGOC dan Kemenpora)

Membangun & menyiapkan kampung atlet maupun infrastrukturnya (Koordinasi dengan INASGOC dan Kemenpora)

Merenovasi dan menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya (Koordinasi dengan INASGOC dan Kemenpora)

Merenovasi dan menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya (Koordinasi dengan INASGOC dan Kemenpora)

Highlight
Kemen PUPR



Kawasan Gelora Bung Karno



Wisma Atlet Kemayoran



Wisma Atlet Jakabaring

Highlight
Kemenhub



LRT Palembang



Pengembangan Bandara SMB II Palembang



LRT Jakarta

Highlight
Kemenpora



Olahragawan Andalan Nasional
Rp 500,0 Miliar setiap tahun (2016-2018)



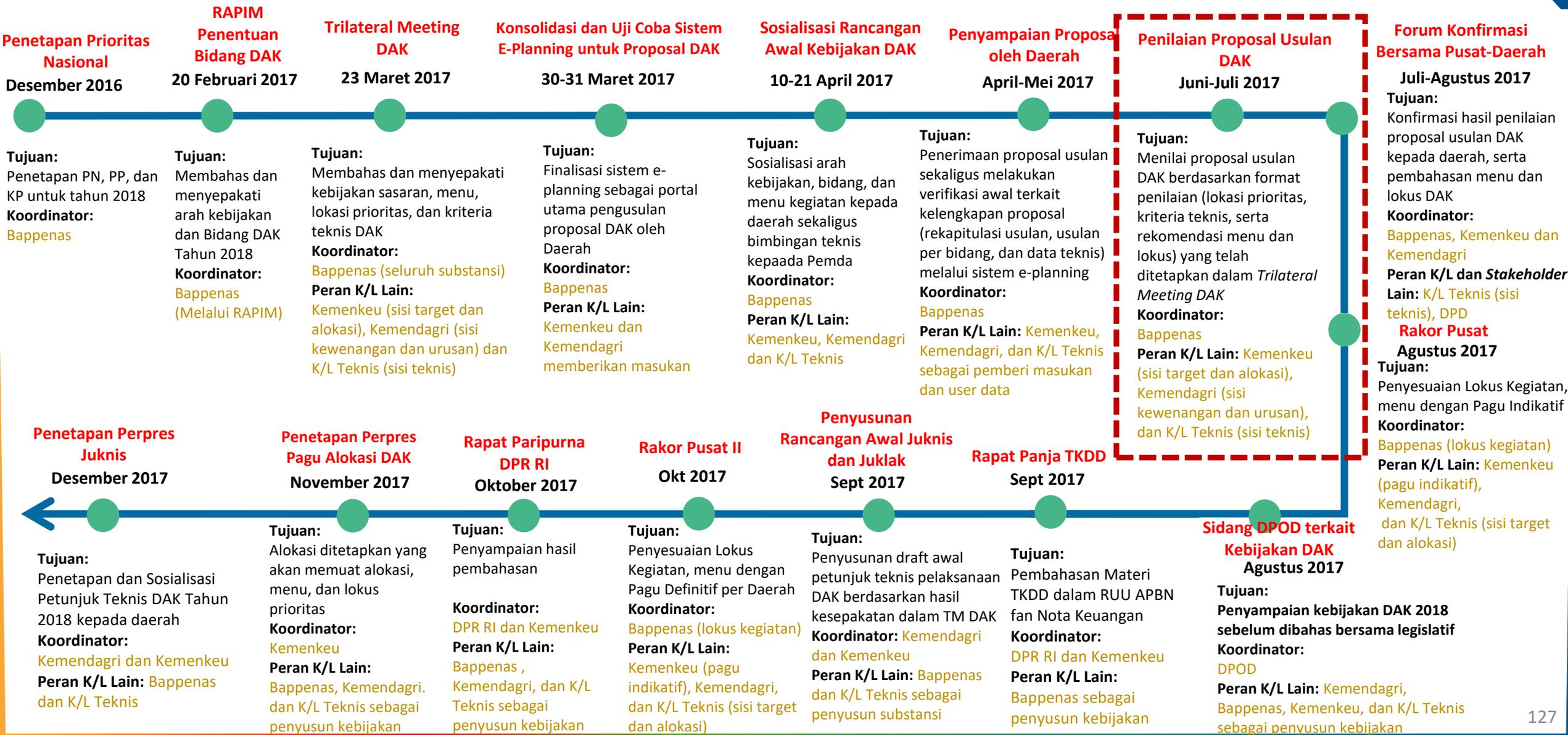
Fasilitas Penyelenggaraan
Rp 500,0 Miliar melalui INASGOC (2017)
Rp 10,0 Miliar melalui INAPGOC (2017)
Direncanakan tambahan sebesar Rp 2,5 T (2018)

DAK Fisik Tahun 2018 Melalui Aplikasi E-Planning DAK

No.	Instansi	Peran dalam e-planning DAK
1.	Pemerintah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Menyampaikan data realisasi DAK tahun 2015 – 2016
2.	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Menyampaikan data realisasi DAK tahun 2015 – 2016 Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota
3.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4.	Kementerian PPN/ Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas Melakukan penilaian terhadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN
5.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan
6.	K/L (teknis)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah secara teknis (relevansi dan akurasi data teknis dan data dukung)

NO	K/L TEKNIS	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	KEMENTERIAN KEUANGAN
1	Kesesuaian usulan kegiatan dengan jenis-jenis kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik.	Kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan dan Prioritas Nasional per bidang/subbidang DAK Fisik.	Kesesuaian usulan kegiatan dengan menu kegiatan per bidang/subbidang DAK Fisik.
2	<p>Usulan target output kegiatan dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik; ✓ perbandingan data teknis kegiatan pada data pendukung usulan DAK Fisik dengan data teknis yang dimiliki oleh kementerian/lembaga teknis; ✓ tingkat capaian Standar Pelayanan Minimum bidang/subbidang yang terkait oleh daerah; ✓ target output/manfaat kegiatan per bidang/subbidang DAK yang diusulkan oleh daerah dalam jangka pendek dan jangka menengah; dan ✓ target output/manfaat per bidang/subbidang DAK secara nasional dalam jangka pendek dan jangka menengah. 	Kesesuaian target output dan lokasi prioritas kegiatan berdasarkan Dokumen Trilateral Meeting DAK per bidang/subbidang.	Kewajaran nilai usulan kegiatan dan indeks kemahalan konstruksi.
3	Kewajaran nilai usulan kegiatan.	Kesesuaian dengan kegiatan lainnya yang tercantum dalam RKP dan RPJMN.	Alokasi dan kinerja penyerapan DAK fisik serta tingkat capaian output tahun sebelumnya.

RANCANGAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA. 2018



PEMBANGUNAN BIDANG

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Revolusi Mental

INDIKATOR	BASELINE 2014	2015	2016	2017	2018	2019
MENINGKATNYA GOTONG ROYONG						
Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	0,56	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	N/A	<5	<5	<5	<5	<5
Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebarkan kebencian, radikalisme dan pornografi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Pembangunan Gender	70,5 (2013)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN REVOLUSI MENTAL

1. Reformasi birokrasi pemerintahan
2. Penegakan hukum dan kelembagaan politik
3. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa
4. Penguatan daya rekat sosial dan kemajemukan
5. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Pengarusutamaan Gender

No	Indikator	Baseline 2014	Capaian 2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN (2019)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34	91,03	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,68	70,83	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

SASARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
2. Tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi dan menurunnya tingkat korupsi

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan
3. Efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam
5. Meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan dan pemantauan dalam pelaksanaannya
6. Pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di tingkat daerah

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan

SASARAN PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

Sasaran utama adalah menurunkan Gini Rasio mendekati 0,38 pada tahun 2018.

KEBIJAKAN PEMERATAAN ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

Diarahkan kepada:

1. Masyarakat yang tergolong di bawah 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah.
2. Penguatan masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan penguatan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu:
 - sumber daya alam
 - kohesi sosial
 - sarana dan prasarana
 - akses terhadap pembiayaan (finansial)
 - penguatan sumber daya manusia.

Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: Tata Kelola Pemerintahan

No	Indikator	Sasaran 2018	Sasaran RPJMN 2015-2019
I.	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik		
	% jumlah PPID di K/L/Pemda	90%	100%
	% K/L/D yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>Public Awareness Campaign</i>	85%	100%
	% K/L/D yang mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran	90%	100%
	% K/L/D yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja (LAKIP)	90%	100%
I.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan		
	% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	90%	100%
	% K/L/D yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing	70%	100%
	% K/L/D yang memiliki website yang mudah diakses, interaktif serta memiliki data dan informasi mutakhir	90%	100%
III.	Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi		
	% K/L/D yang telah menyusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi	100%	100%
	% K/L/D yang telah melakukan penataan organisasi	90%	100%
	% K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja	90%	100%
	Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan e-Government (e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Performance/e-Reporting) secara integratif	90%	100%
	% K/L/D yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) system dalam rekrutmen CPNS	100%	100%
III.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan	90%	100%
	% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi (LAPOR!)	90%	100%
	% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT (e-services)	90%	100%
	% unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	100%

ARAH KEBIJAKAN

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
3. Peningkatan kapasitas birokrasi
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik